

Panduan

Penyelenggaraan Sekolah Model

Implementasi Pembelajaran Mendalam
dan Koding dan Kecerdasan Artifisial





Panduan

Penyelenggaraan Sekolah Model

**Implementasi Pembelajaran Mendalam
dan Koding dan Kecerdasan Artifisial**

Panduan Penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial

Pengarah Utama

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Arif Jamali, S.Pd. M.Pd., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul

Didik Suhardi, Ph.D., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan

Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan

Ir. Moch. Abduh, MS.Ed., Ph.D., Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Teknologi Pendidikan

Penanggung Jawab

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Muhammad Yusro, S.Pd., M.T., Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Tim Penyusun

Dr. Yogi Anggraena, M.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Taufiq Damarjati, M.T., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Fathur Rohim, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Arie Tristiani, S.Pd, M.A., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Medira Ferayanti, S.S., M.A., Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Lukman Solihin, S.Ant., M.A., Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Diyan Nur Rakhmah, S.Sos., M.A., Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Dra. Mareta Wahyuni, M.Pd., Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Lanny Anggraini, S.Pd., M.A., Direktorat Sekolah Dasar

Sulastri, S.Pd., M.Si., Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Rina Imayanti, S.Si., M.Ak., Direktorat Sekolah Menengah Atas

Muhamad Habib, S.S.T., Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Meike Anastasia M. S.IP., M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Desi Elvera Dewi, S.TP., M.M., Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

Dr. Nita Isaeni. SIP., M.Pd., Direktorat Guru Pendidikan Dasar

Eneng Siti Saadah, S.Si., M.B.A., Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Adi Cilik Pierewan, Ph.D., Universitas Negeri Yogyakarta

Tim Penelaah

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Prof. (Em) Suyanto, M.Ed., Ph.D., Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Suwarsih Madya, M.A., Ph.D., Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. (Em) Dr. Ir. Bambang Soehendro, M.Sc., Universitas Gadjah Mada

Prof. Ali Saukah, M.A., Ph.D., Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Prof. Bambang Suryadi, Ph.D., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Pd., Universitas Negeri Malang

Prof. Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D., Atdikbud KBRI Canberra

Ir. Harris Iskandar Ph.D., Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc., Praktisi Pendidikan
Ingga Vistara, INOVASI
Tri Maulana, INOVASI
M. Heru Iman Wibowo, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Putu Widyarani Kusumadewi, S.T., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Triyani Oktaria, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Kontributor

Andreas Setiyono, S.Pd.Gr., M.Kom., SD Anak Saleh
Drs. Andri Defrioka, M.Pd., Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Dr. phil. nat. Maya Oktavia Tutughamiarso, IPH Schools, Surabaya
Dr., Dra. Reni Herawati, M.Pd.B.I., Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
Fanny S.Pd., SMPLB Negeri Ternate
Hairul Saleh, S.Si., SPNF SKB Bontang
Marini Amalia Ocvianti, S.Si., M.Pd., SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
Sahri, S.Pd., M.Si., Dinas Pendidikan Kab. Kaimana Papua Barat
Sarlivanti, S. Pd., M.Pd., SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe, Aceh
Sri Wantini, M.Pd., SMAN Banua Kalimantan Selatan
Gufron Firmansyah, S.Pd., SMK Negeri 2 Mantangai Kalimantan Tengah
Khoiri Nugraheni, S.Pd., SLB Catur Bina Bangsa
Khoirun Nisa, S.Pd.,Gr., SMPN 1 Sungai Pinyuh
Dr. Putu Dina Yuniarini, SE., S.Psi., M.Pd., TK SILA KUMARA
Yorsi Nuzulia, S.Pd., M.Sc., TK Paramarta Pangkalpinang
Albertus Fiharsono, S.Pd., M.Hum., Ph.D., SMAN Kolese Pendidikan Guru Khas Papua Merauke
Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed., SMA N 5 Kupang, Nusa Tenggara Timur
Meilisa Usman, S.Pd., Gr., UPTD SMP Negeri 5 Budong-Budong
Nonon Rosnelly, S.Pd., SMKs Teknologi Muhamamdiyah Limboto
Nurbadriyah, M.Pd., Dinas Pendidikan Provinsi Banten
Orley Charity Sualang, S.Psi., MA., PAUD Farley Christian Children Center
Putri Maria Widayani, S.Pd., SMP N 4 Arso
Semeon Silalahi, S.Pd., Gr., M.Pd., SD N 091473 Plus Tiga Balata
Virsa Vialin Tildjuir, S.Pd., SMP Negeri 5 Benjina
Ilania Eka Andari, M.Pd., SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunungkidul DIY
Ika Zahrotun Naafiah, S.Pd., SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta
Annisa Eva Nurabia, S.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Penyunting

Retno Utami, S.Pd., M.Hum., Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Ilustrasi dan Tata Letak

Studio Kawa Kreatif Indonesia

Penerbit

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Kata Pengantar



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya Panduan Penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat terselesaikan. Panduan ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung transformasi pendidikan nasional dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Pembelajaran mendalam dirancang sebagai pendekatan yang mampu menjawab tantangan krisis pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 melalui pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analitis serta menumbuhkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggungjawab.

Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial diselenggarakan sebagai laboratorium implementasi pembelajaran mendalam dan koding dan kecerdasan artifisial secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui Sekolah Model, diharapkan terbangun praktik baik, budaya refleksi, serta ekosistem pembelajaran yang kolaboratif antara pendidik, tenaga kependidikan, murid dan pemangku kepentingan lainnya.

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan bagi unit-unit pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pihak terkait lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi rujukan dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Jakarta, Februari 2026

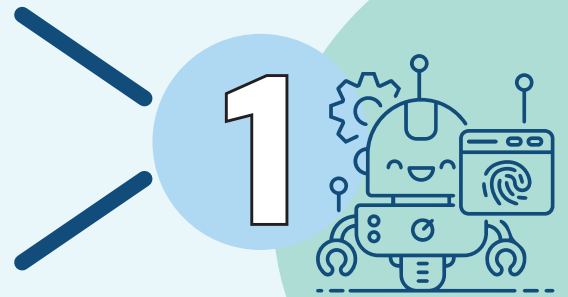
Kepala Badan Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan



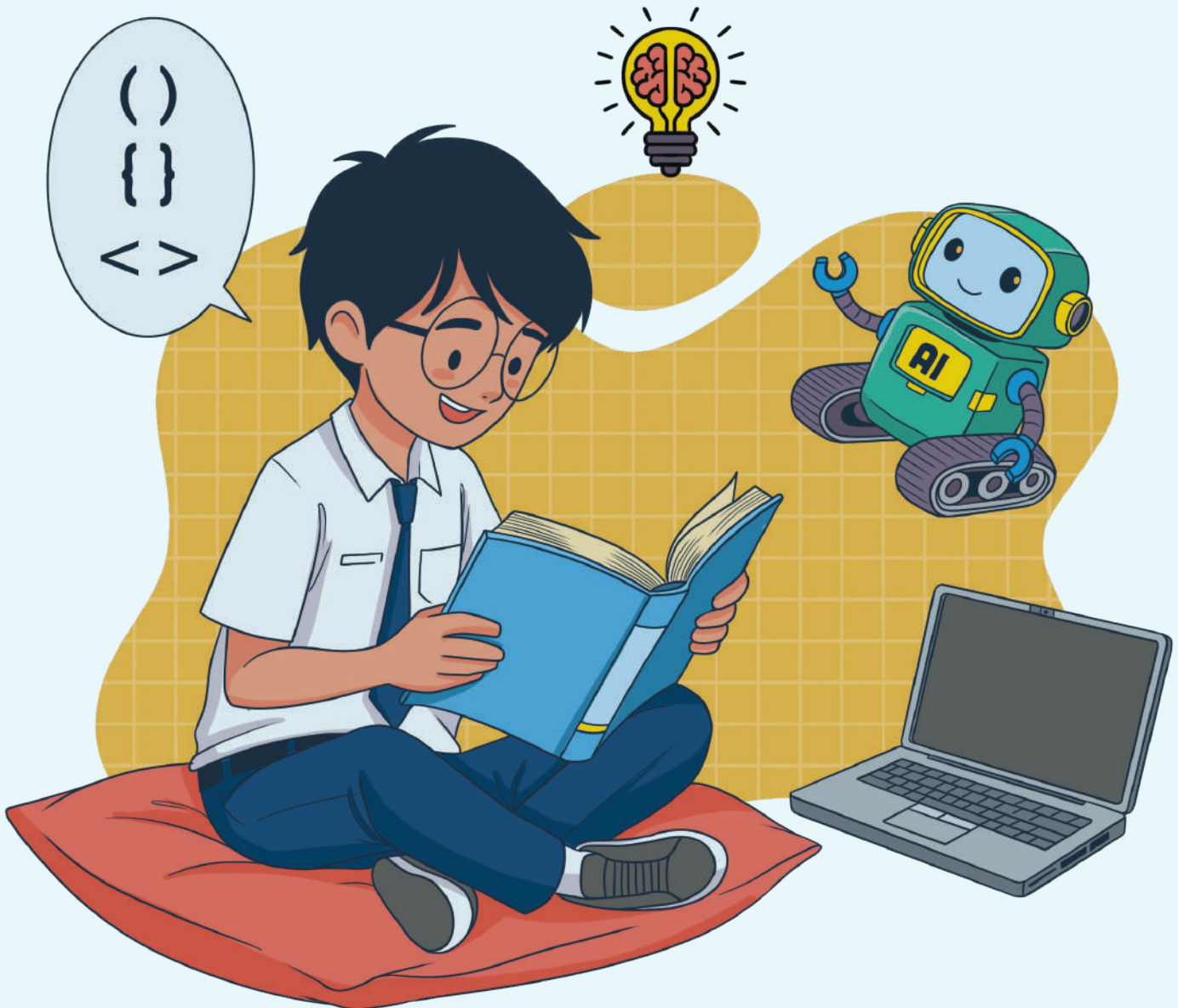
★Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab 1 Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan Panduan.....	5
D. Sasaran	5
Bab 2 Konsep Sekolah Model Implementasi	7
A. Pengertian	7
B. Fungsi dan Peran	8
C. Kriteria Sekolah Model.....	8
D. Prinsip Penyelenggaraan.....	10
E. Kriteria Keberhasilan	11
Bab 3 Penyelenggaraan dan Strategi Perubahan	14
A. Tahapan Penyelenggaraan.....	14
B. Strategi Perubahan.....	24
Bab 4 Peran Pemangku Kepentingan.....	31
A. Struktur Organisasi Penyelenggara.....	31
B. Tugas dan Tanggung Jawab	32
Bab 5 Mekanisme Penguatan Implementasi	45
A. Pelatihan dan Pendampingan Satuan Pendidikan	45
B. Pengembangan Sumber Belajar dan Perangkat Pembelajaran	49
C. Fasilitasi <i>Showcasing</i> dan Penguatan Jejaring	50
D. Penguatan Kelompok Kerja Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah/Penilik	50
E. Advokasi Dinas Pendidikan.....	51
F. Pemantauan dan Evaluasi.....	52
Glosarium	54
Daftar Pustaka	55
Lampiran	58



Pendahuluan





Bab.1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Komitmen tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-4 yang menekankan pentingnya menjamin akses terhadap pendidikan berkualitas, penguasaan literasi dan numerasi dasar, serta pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat modern dan demokratis (United Nations, 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan prinsip *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tentang kesetaraan pendidikan, yang menekankan bahwa capaian belajar merefleksikan kemampuan akademik, bukan kondisi sosial-ekonomi atau latar belakang sosioekonomi (OECD, 2018).

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait mutu dan pemerataan pendidikan. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 menunjukkan penurunan skor dalam membaca (359), matematika (366), dan sains (383), jauh di bawah rata-rata global dengan hanya 25% murid mencapai level kompetensi minimum dalam membaca dan hampir tidak ada yang mencapai level tertinggi. Kesenjangan sosio ekonomi memperparah masalah ini: 43,21% murid berada di kuintil terbawah, menunjukkan capaian jauh lebih rendah dibandingkan kelompok atas. Disparitas juga terlihat antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T), terutama dalam infrastruktur, partisipasi, dan akses teknologi digital.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia juga menghadapi tuntutan transformasi digital global. *Future of Jobs Report 2025* yang dirilis *World Economic Forum*



memproyeksikan terciptanya sekitar 149 juta pekerjaan baru di sektor digital, terutama pada bidang kecerdasan artifisial, *big data*, jaringan, keamanan siber, dan literasi teknologi (WEF, 2025). Sementara Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital hingga 2030, angka yang jauh melebihi kapasitas pendidikan tinggi saat ini yaitu 100.000-200.000 talenta digital per tahun (Kemenkomdigi, 2025).

Untuk menjawab kebutuhan ini, penguatan keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan 4C, yaitu *critical thinking*, *communication*, *collaboration*, dan *creativity* dan enam kompetensi global (6C), yaitu *character*, *citizenship*, *collaboration*, *communication*, *creativity*, dan *critical thinking* (Fullan, Quinn, & McEachen, 2018) harus dimulai sejak pendidikan dasar dan menengah. Konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konten, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam konteks global. Pembelajaran Mendalam (PM) hadir sebagai pendekatan pembelajaran yang memuliakan untuk membentuk kompetensi dan karakter murid (Suyanto dkk., 2025). Selain itu, kebijakan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) menjadi wahana strategis untuk meningkatkan literasi digital, etika, dan kemampuan berpikir logis dan sistematis (Riady dkk., 2025).

Sebagai respons strategis, pengembangan Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam (PM) serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah Model Implementasi ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman konseptual, berpikir tingkat tinggi, literasi digital, dan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Sekolah Model Implementasi juga berperan sebagai: (1) uji coba dan penyempurnaan praktik PM dan KKA; (2) pusat belajar bagi satuan pendidikan lain; (3) sumber inovasi pembelajaran; dan (4) penggerak ekosistem pendidikan daerah.

Dalam jangka panjang, inisiatif ini merupakan investasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan bonus demografi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global menjadi kunci. Keberhasilan Sekolah Model Implementasi diharapkan mendorong replikasi sistematis praktik baik, sehingga mempercepat transformasi pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Sinergi seluruh pemangku kepentingan (pusat, daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat) menjadi syarat utama keberhasilannya. Melalui panduan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat) dapat bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.



B. Landasan Hukum

1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

4

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

5

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

6

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

7

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

8

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 126/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

9

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.



C. Tujuan Panduan

Panduan penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA disusun dengan tujuan untuk:

1

memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA

2

memberikan acuan bagi unit utama, direktorat teknis, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.

3

memberikan gambaran mekanisme kerja penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA bagi seluruh pemangku kepentingan.

D. Sasaran

Panduan penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM serta KKA ditujukan untuk:

1

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

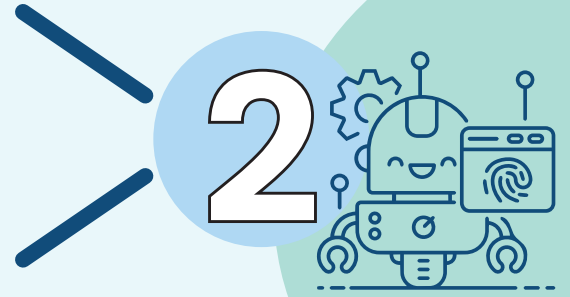
3

Pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.

4

Mitra pembangunan pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.





Konsep Sekolah Model Implementasi





Bab.2

Konsep Sekolah Model Implementasi

A. Pengertian

Model adalah representasi selektif dari suatu sistem yang bentuk dan isinya dipilih berdasarkan serangkaian pertimbangan tertentu (Object Management Group, 2010). Sekolah Model secara definisi konseptual merupakan satuan pendidikan yang merupakan perwakilan dari seluruh populasi yang dipilih berdasarkan kriteria atau serangkaian pertimbangan tertentu. Sekolah Model Implementasi PM dan KKA merupakan satuan pendidikan yang dipilih sebagai representasi implementasi PM dan KKA di seluruh satuan pendidikan. Dalam panduan ini, istilah 'Sekolah Model Implementasi' mencakup satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

Sekolah Model Implementasi merupakan satuan pendidikan yang secara konsisten menerapkan PM sebagai praktik pembelajaran unggul dan/atau pembelajaran KKA sebagai mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan ini berfungsi sebagai laboratorium inovasi pembelajaran, percontohan implementasi kebijakan, serta sumber pengembangan kapasitas bagi satuan pendidikan lain.

Sekolah Model Implementasi PM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Pembelajaran Mendalam untuk membentuk 8 Dimensi Profil Lulusan. Sedangkan Sekolah Model Implementasi KKA bertujuan untuk menyiapkan SDM dengan keterampilan digital (koding & KA) serta kemampuan murid dalam berpikir kritis, logis, dan sistematis sejak pendidikan dasar-menengah untuk menjawab tantangan kesenjangan talenta digital.



B. Fungsi dan Peran

Sekolah Model Implementasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:



Sebagai percontohan implementasi PM dan KKA: menjadi contoh nyata pelaksanaan PM dan KKA yang utuh, konsisten, dan berkualitas sebagai acuan implementasi di satuan pendidikan lain.



Sebagai pusat belajar, patok banding (*benchmarking*), dan replikasi praktik baik: menyediakan ruang dan mekanisme bagi pendidik, pemangku kepentingan, dan satuan pendidikan lain untuk mengamati, mempelajari, serta mengadopsi praktik baik dalam penerapan PM dan KKA.



Sebagai sumber inovasi pembelajaran dan manajemen PM dan KKA di satuan pendidikan: mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan pendekatan inovatif, baik dalam desain pembelajaran maupun tata kelola satuan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan PM dan KKA.



Sebagai penggerak ekosistem pendidikan di daerah: memfasilitasi kolaborasi antarsatuan pendidikan, komunitas pendidik (seperti KKG/MGMP), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat dukungan sistematis terhadap penerapan PM dan KKA secara berkelanjutan.



Secara khusus Sekolah Model Implementasi KKA berfungsi sebagai laboratorium pengembangan keterampilan digital serta kemampuan murid dalam berpikir kritis, logis, dan sistematis.

C. Kriteria Sekolah Model

Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah Model Implementasi PM dan KKA secara umum harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:



1. Sekolah Model Implementasi yang direkomendasikan Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen.

- a. Pernah mengikuti pelatihan PM dan KKA/PBK KA.
- b. Memiliki akreditasi minimal B.
- c. Memiliki skor Rapor Pendidikan dengan capaian indikator prioritas minimal kuning/sedang khusus satuan PAUD, SLB/SKh, SKB/PKBM, serta hijau/baik untuk SD, SMP, SMA dan SMK.
- d. Memiliki capaian literasi dan numerasi minimal kuning/sedang.
- e. Telah menerapkan mata pelajaran KKA sebagai mapel pilihan (khusus untuk Sekolah Model Implementasi KKA).
- f. Untuk satuan PAUD: telah menerapkan pengembangan berpikir komputasional (PBK) dalam pembelajaran.
- g. Mendapat dukungan dari yayasan (khusus untuk satuan pendidikan swasta).
- h. Mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.
- i. Menunjukkan komitmen kuat dari kepala satuan pendidikan terhadap penerapan PM dan KKA.

2. Sekolah Model Implementasi rekomendasi mitra.

- a. Memiliki Akreditasi minimal B.
- b. Memiliki Rapor Pendidikan dengan indikator prioritas minimal kuning/sedang (khusus PAUD).
- c. Memiliki capaian literasi dan numerasi minimal kuning/sedang.
- d. Telah menerapkan mata pelajaran KKA sebagai mapel pilihan (untuk Sekolah Model Implementasi KKA).
- e. Untuk satuan PAUD, telah menerapkan pengembangan berpikir komputasional (PBK).
- f. Diprioritaskan untuk satuan pendidikan yang sudah mengikuti pelatihan PM dan KKA/PBK KA.
- g. Memiliki dukungan dari yayasan atau lembaga penyelenggara.
- h. Memiliki komitmen kuat dari kepala satuan pendidikan untuk mengimplementasi PM dan KKA.



D. Prinsip Penyelenggaraan

Sekolah Model Implementasi PM dan KKA diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Objektif

Penyelenggaraan didasarkan pada data dan bukti yang sahih, valid, dan terukur, serta dianalisis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang bebas dari asumsi, opini, dan kepentingan subjektif, dan didukung oleh bukti empiris.

b. Transparan

Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara transparan. Informasi mengenai hasil evaluasi, capaian mutu, serta rencana perbaikan harus dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh publik dan seluruh pemangku kepentingan, dengan memastikan kejelasan, akurasi, dan kejujuran.

c. Akuntabel

Setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan administratif. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan hasil pemetaan mutu, pelaksanaan rencana pemenuhan mutu, serta tindak lanjut perbaikan terukur.

d. Komprehensif

Penyelenggaraan mencakup seluruh aspek layanan pendidikan antara lain kurikulum, pembelajaran, asesmen, sarana prasarana, manajemen, dan budaya satuan pendidikan sesuai SNP atau standar lain yang mencerminkan keunggulan dan kekhasan satuan pendidikan.

e. Partisipatif

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pendidik, murid, orang tua, komite sekolah, dan pemerintah dilibatkan secara aktif dalam perencanaan,



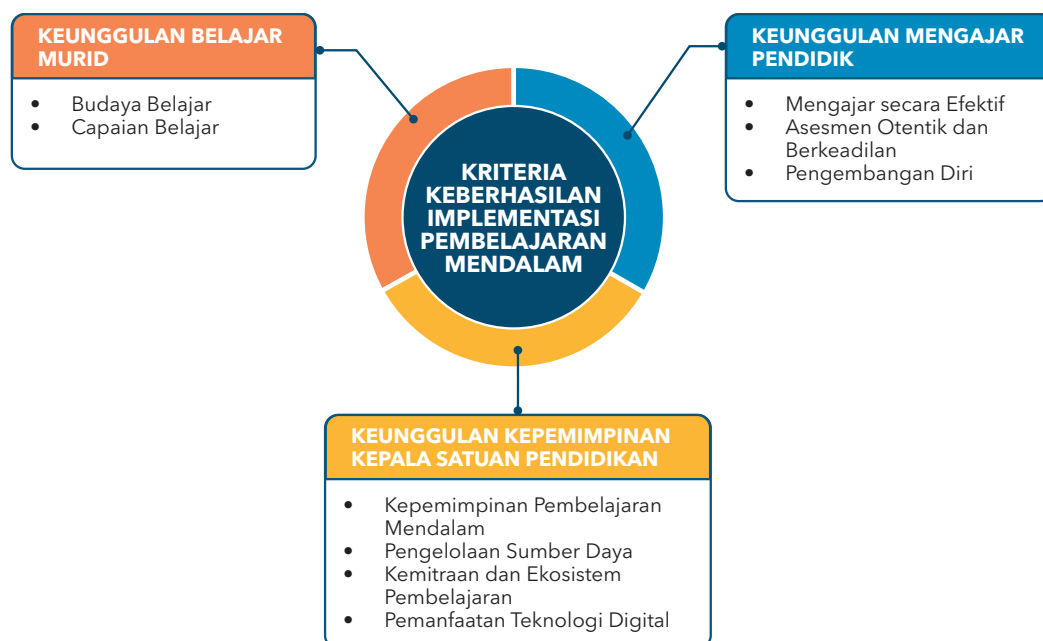
pelaksanaan, dan evaluasi program, Keterlibatan ini memperkuat relasi dan memastikan keputusan diterima dan didukung secara kolektif.

f. Berkelanjutan

Penerapan PM dan KKA tidak bersifat insidental, tahunan atau hanya penugasan administratif, melainkan menjadi bagian dari penjaminan mutu satuan pendidikan. Satuan pendidikan harus terus memperbarui rencana, mengevaluasi hasil, dan mereplikasi praktik baik secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan jangka panjang.

E. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan (*success criteria*) Implementasi PM dibagi ke dalam aspek (1) Keunggulan Belajar Murid; (2) Keunggulan Mengajar Pendidik; dan (3) Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan. Dimensi dalam ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kriteria keberhasilan Implementasi PM

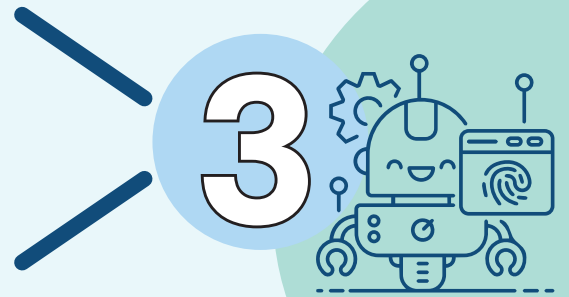
Mengingat Sekolah Model Implementasi KKA juga menerapkan PM maka indikatornya terintegrasi pada ketiga aspek Sekolah Model Implementasi PM. Adapun indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1 Indikator pada kriteria keberhasilan Implementasi KKA

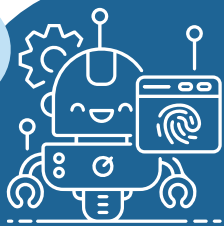
Aspek	Dimensi	Indikator
Keunggulan Belajar Murid	Budaya Belajar	Projek KKA yang dikembangkan murid
	Capaian Belajar	Capaian kompetensi KKA
Keunggulan Mengajar Pendidik	Mengajar Secara Efektif	Literasi digital guru
		Pemanfaatan teknologi secara kontekstual dalam pelaksanaan atau pengelolaan pembelajaran
Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan	Asesmen Otentik dan Berkeadilan	Pemanfaatan teknologi secara kontekstual dalam penilaian pembelajaran
	Kepemimpinan Pembelajaran Mendalam	Memimpin implementasi KKA
		Supervisi pembelajaran KKA
	Pengelolaan Sumber Daya	Penguatan kapasitas dan aktivasi komunitas belajar pendidik pengampu KKA
		Penyediaan sumber belajar KKA
	Kemitraan dan Ekosistem Pembelajaran	Pengembangan kemitraan untuk mendukung pembelajaran KKA
		Penyediaan sarana dan prasarana digital yang mendukung pembelajaran KKA
	Pemanfaatan Teknologi Digital	Mendorong pemanfaatan teknologi digital secara kontekstual untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran KKA yang bermakna

Dimensi dan indikator dari kriteria keberhasilan Implementasi PM dan KKA dapat dilihat pada Lampiran.



Penyelenggaraan dan Strategi Perubahan





Bab.3

Penyelenggaraan dan Strategi Perubahan

A. Tahapan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA dilaksanakan melalui empat tahapan utama: (1) tahap pra berkembang, (2) tahap berkembang, (3) tahap maju, dan (4) tahap unggul. Keempat tahap ini berlaku pada tiga area pengembangan, yaitu keunggulan belajar murid, keunggulan mengajar pendidik, dan keunggulan kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Masing-masing area pengembangan dapat memiliki tahapan yang berbeda. Setiap tahapan mencakup penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas pendidik, pemenuhan sarana prasarana, praktik pembelajaran, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal. Secara umum tahapan dan fokus pengembangan tiap tahap dapat terlihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 2. Tahapan Penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA



Penjelasan dari masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Pra Berkembang



Tahap Pra Berkembang merupakan fase awal untuk membangun dasar-dasar pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan. Pada tahap ini, satuan pendidikan mengutamakan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, inklusif, dan bebas kekerasan, sebagai prasyarat dasar agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik.

Dari sisi murid, perhatian utama diberikan pada rasa aman, penghargaan, dan keterlibatan awal dalam pembelajaran. Murid mulai dilibatkan dalam proses belajar, meskipun kemandirian belajar dan refleksi murid masih terbatas dan memerlukan bimbingan pendidik secara intensif. Dari aspek pendidik, tahap Pra Berkembang ditandai dengan penguatan pemahaman dasar komponen inti pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan mulai memperhatikan prinsip Pembelajaran Mendalam. Pendidik mulai menerapkan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, namun penerapan tersebut belum dilakukan secara konsisten. Dari aspek kepemimpinan, kepala satuan pendidikan pada tahap ini berperan dalam menumbuhkan kesadaran bersama tentang Pembelajaran Mendalam sebagai arah pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan mulai menyelaraskan visi dan misi sekolah dengan prinsip Pembelajaran Mendalam, melakukan sosialisasi awal kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta memastikan dukungan dasar bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan tertib.



Integrasi KKA pada tahap ini diarahkan pada pengenalan konsep algoritma dasar dan literasi digital melalui aktivitas visual yang sederhana. Kegiatan koding awal ditujukan untuk membangun kemampuan berpikir logis dan sistematis pada murid, sekaligus membiasakan pendidik memasukkan elemen digital dalam pembelajaran rutin.

Rencana aksi tahap ini mencakup pelatihan dasar penyusunan perencanaan pembelajaran dan penilaian formatif, sosialisasi standar penilaian satuan pendidikan, penguatan budaya positif dan kode etik, serta pengenalan teknik mengajar berpusat pada murid. Satuan pendidikan menyediakan sumber belajar dasar, termasuk platform digital sederhana untuk administrasi maupun pembelajaran.



Evaluasi tahap Pra Berkembang dilakukan melalui observasi kelas, analisis dokumen perencanaan pembelajaran, survei kepuasan dan rasa aman murid, serta pemetaan hasil belajar awal sebagai *baseline*. Integrasi KKA dievaluasi melalui partisipasi murid dalam aktivitas koding dasar serta kemampuan pendidik menerapkannya dalam pembelajaran.

2. Tahap Berkembang



Pada Tahap Berkembang, satuan pendidikan memfokuskan diri pada penguatan konsistensi pembelajaran berpusat pada murid, mengacu pada kebutuhan, karakteristik, dan capaian belajar murid. Pada tahap ini, lingkungan belajar yang aman, tertib, dan inklusif telah terbentuk, dan mulai diikuti dengan upaya menjaga konsistensi praktik pembelajaran di kelas.

Dari sisi murid, pada tahap ini murid semakin terlibat aktif dalam pembelajaran, mulai memahami tujuan pembelajaran, serta menanggapi umpan balik dari pendidik. Murid mulai berlatih melakukan refleksi sederhana terhadap proses dan hasil belajar, meskipun kemandirian belajar masih memerlukan bimbingan pendidik secara rutin. Dari aspek pendidik, tahap Berkembang ditandai dengan penerapan pembelajaran berpusat pada murid yang mulai lebih konsisten, termasuk penggunaan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Pendidik mulai memanfaatkan hasil asesmen formatif untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih terarah, meskipun keterpaduan perencanaan dan penerapan belum merata di semua kelas. Dari aspek kepemimpinan, kepala satuan pendidikan pada tahap ini berperan dalam menguatkan konsistensi implementasi Pembelajaran Mendalam melalui pendampingan awal dan supervisi pembelajaran yang bersifat pembinaan, serta mulai mendorong refleksi dan kolaborasi antarpendidik.



Integrasi KKA ditingkatkan melalui pemanfaatan bahasa pemrograman visual berbasis blok. Murid mulai mengembangkan proyek koding sederhana yang mendukung literasi digital dan kolaborasi antar mata pelajaran. Upaya ini juga bertujuan menumbuhkan komunitas belajar KKA internal yang melibatkan pendidik dan murid.

Rencana aksi tahap ini mencakup penguatan kompetensi pendidik melalui antara lain *workshop* penyusunan instrumen penilaian autentik, pengembangan rubrik,

kegiatan *lesson study*, serta penguatan kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran interaktif semakin diperluas.

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan partisipasi aktif murid dalam pembelajaran, analisis kualitas umpan balik pendidik dalam penilaian formatif, dokumentasi refleksi pendidik dan murid, serta peningkatan kompetensi teknologi pembelajaran. Progres KKA dievaluasi berdasarkan jumlah dan kualitas proyek koding sederhana serta peningkatan literasi digital murid.

3. Tahap Maju



Tahap Maju merupakan fase penguatan kualitas Pembelajaran Mendalam, ditandai dengan keterlibatan aktif murid dalam pembelajaran serta kemampuan mereka merefleksikan proses dan hasil belajar. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pendekatan kolaboratif, berbasis proyek, dan berbasis inkuiri yang bermakna dan kontekstual. Sistem asesmen berkembang menjadi autentik dan berkeadilan yang memotret capaian murid dari aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kontribusi sosial.

Kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan dunia kerja diperluas untuk memberikan pengalaman belajar kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Kepala Satuan Pendidikan berperan aktif dalam menguatkan dan memfasilitasi kemitraan tersebut sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pembelajaran Integrasi KKA pada tahap ini diarahkan pada pengembangan proyek KA sederhana. Tujuannya adalah memupuk keberanian berinovasi, kreativitas, serta pemahaman awal murid mengenai teknologi masa depan.



Rencana aksi pada fase ini diarahkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman autentik melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek, inkuiri, dan model kolaboratif di seluruh mata pelajaran. Pendidik diposisikan sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar yang memfasilitasi keterlibatan aktif dan refleksi murid. Satuan pendidikan mengembangkan sistem penilaian berbasis portofolio dan proyek sehingga proses belajar tidak hanya dinilai dari hasil



akhir, tetapi juga dari proses, refleksi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kolaborasi dengan dunia kerja dan komunitas profesional didorong untuk memperkaya pengalaman belajar murid termasuk melalui pengembangan proyek KA sederhana, seperti pembuatan *chatbot* atau pengenalan objek, yang dikontekstualisasikan dengan isu pembelajaran nyata di satuan pendidikan atau lingkungan sekitar.

Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan menilai tingkat keterlibatan murid dalam proyek autentik dan kontribusi mereka terhadap lingkungan sosial. Kemampuan murid untuk merefleksi proses, menjelaskan keputusan, serta mempresentasikan hasil belajar menjadi indikator kunci kualitas pembelajaran. Satuan pendidikan juga mengumpulkan umpan balik dari orang tua, dunia kerja, dan mitra profesional untuk memastikan keterhubungan pembelajaran dengan kebutuhan nyata. Aspek karakter dan kompetensi sosial emosional dipantau secara berkelanjutan melalui observasi, refleksi diri, dan asesmen kolaboratif. Selain itu, kualitas proyek KA sederhana yang dikembangkan murid termasuk ketepatan fungsi, kreativitas solusi, dan relevansinya dengan konteks lokal menjadi bagian penting dari penilaian keberhasilan program.

4. Tahap Unggul



Pada Tahap Unggul murid secara konsisten menunjukkan sikap saling memuliakan melalui penggunaan bahasa verbal dan nonverbal yang tepat, mengelola proses belajar secara mandiri dan berkelanjutan, termotivasi secara intrinsik, serta mampu merefleksikan serta menerapkan pembelajaran secara mendalam dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Murid mengambil kendali penuh atas pembelajaran, bertanggung jawab atas keputusan belajarnya, dan berperan aktif membimbing teman sebaya. Selain itu, pendidik berperan sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator pembelajaran mendalam dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menggemblirakan. Pendidik secara konsisten merancang dan melaksanakan pembelajaran bermakna, melakukan refleksi berbasis data, serta berbagi praktik baik untuk memperkuat budaya belajar bersama dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kepala Satuan Pendidikan memimpin terbentuknya



ekosistem belajar yang inovatif, reflektif, dan berkelanjutan melalui kepemimpinan instruksional yang transformatif. Satuan pendidikan menjadi ruang berbagi praktik baik, tempat pengembangan profesional, serta pusat rujukan yang memberi dampak positif dan menggerakkan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar.

Integrasi KKA di tahap ini mencapai tingkat kematangan, di mana satuan pendidikan tidak hanya menerapkan, tetapi juga mengembangkan inovasi digital dan KA. Proyek-proyek digital yang dihasilkan murid diarahkan pada isu strategis seperti lingkungan, kesehatan, atau pengembangan *Internet of Things* (IoT). Satuan pendidikan memastikan penguatan etika digital dan literasi KA untuk membentuk murid yang cakap dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Rencana aksi pada tahap ini menempatkan **satuan pendidikan sebagai pusat rujukan praktik baik dan inovasi** pembelajaran mendalam yang berdampak bagi wilayah sekitarnya. Kepala satuan pendidikan memimpin penguatan ekosistem belajar melalui kebijakan, tata kelola, dan jejaring kolaboratif lintas satuan pendidikan agar praktik baik terkelola secara sistematis dan berkelanjutan. **Pendidik** didorong berperan sebagai penggerak dan mentor dalam komunitas belajar profesional melalui KKG, MGMP, lokakarya, serta forum kolaboratif lintas sekolah untuk berbagi, merefleksikan, dan mereplikasi inovasi pembelajaran. Untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas replikasi, program pendampingan dan mentorship antarsatuan pendidikan diperkuat dengan melibatkan **pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagai narasumber praktik baik**. Melalui strategi ini, **murid** memperoleh pengalaman belajar yang semakin bermakna, mandiri, dan berdaya, seiring menguatnya budaya belajar mendalam di tingkat sekolah dan wilayah.

Selain itu, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif lokal dan global, termasuk memfasilitasi proyek digital atau KA berdampak sosial—misalnya IoT untuk pemantauan lingkungan atau solusi teknologi sederhana yang merespons kebutuhan masyarakat.



Evaluasi pada tahap ini difokuskan pada **keberhasilan satuan pendidikan dalam menumbuhkan dan menyebarluaskan praktik pembelajaran mendalam** yang berdampak nyata. Indikator utama meliputi **lahirnya karya** inovatif pendidik dan murid baik dalam bentuk praktik pembelajaran, produk, publikasi,

maupun program yang diakui pada tingkat regional, nasional, atau lebih luas. **Keberhasilan kolaborasi** diukur melalui tingkat keterlibatan satuan pendidikan dalam jejaring profesional lintas satuan pendidikan, komunitas belajar, dan forum pendidikan, termasuk partisipasi aktif sebagai narasumber, mentor, atau pusat rujukan praktik baik. **Survei kepuasan** komunitas dan pemangku kepentingan digunakan untuk menilai kontribusi satuan pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan dan sosial di wilayahnya. **Dampak** program dievaluasi melalui peningkatan mutu pembelajaran dan budaya belajar mendalam di **lingkungan sekitar**, **jumlah satuan pendidikan yang terimbas** melalui program mentorship, serta keberlanjutan replikasi inovasi yang didukung oleh kepemimpinan sekolah dan komunitas profesional. Evaluasi ini memastikan satuan pendidikan tidak hanya unggul secara internal, tetapi juga memberi dampak luas dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak program juga diukur melalui peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekitar, jumlah satuan pendidikan terimbas dari program *mentorship*, serta kualitas produk digital atau KA yang berhasil diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ringkasan rencana aksi dan evaluasi dari fokus pengembangan berdasarkan 4 tahap penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Matriks Tahapan Penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA

Tahap/Level	Fokus Pengembangan	Rencana Aksi	Evaluasi
TAHAP 1 - PRA BERKEMBANG	- Membangun fondasi lingkungan belajar yang aman, tertib, inklusif, dan bebas kekerasan. - Pelibatan murid dalam proses pembelajaran	Sosialisasi standar penilaian formatif-sumatif, budaya positif, dan kode etik satuan pendidikan.	Observasi kelas (kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan).

Tahap/Level	Fokus Pengembangan	Rencana Aksi	Evaluasi
	- Membangun kesadaran dasar tentang komponen pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian). - Pendidik memahami tujuan pembelajaran dan penilaian dasar. - Penyelarasan visi-misi sekolah dengan prinsip Pembelajaran Mendalam melalui peran kepemimpinan kepala sekolah. - Pengenalan konsep algoritma dasar dan literasi digital sebagai fondasi KKA.	- Pelatihan dasar penyusunan perencanaan pembelajaran dan penilaian formatif. - Pengenalan teknik mengajar sederhana berpusat murid. - Penyediaan sumber belajar dasar (buku teks, LKPD, platform digital sederhana). - Aktivitas koding dasar berbasis media visual sebagai integrasi awal KKA.	- Analisis dokumen perencanaan pendidik. - Survei kepuasan murid terhadap metode mengajar dan rasa aman. - Nilai hasil belajar awal (<i>baseline</i>). - Pemantauan kemampuan pendidik mengintegrasikan koding dasar dan partisipasi murid dalam aktivitas KKA awal.
TAHAP 2 – BERKEMBANG	- Penguatan konsistensi penerapan pembelajaran berpusat pada murid. - Integrasi penilaian formatif - Budaya refleksi pendidik dan murid.	<i>Workshop</i> instrumen penilaian otentik dan diferensiasi. <i>Peer teaching</i> dan <i>lesson study</i>. - Mengoptimalkan penggunaan asesmen formatif dan umpan balik	- Peningkatan partisipasi aktif murid. - Analisis hasil penilaian formatif dan kualitas umpan balik. - Jurnal refleksi pendidik dan murid.



Tahap/Level	Fokus Pengembangan	Rencana Aksi	Evaluasi
	- Konsistensi pendampingan kepala satuan pendidikan kepada pelaksanaan Pembelajaran Mendalam - Penguatan literasi digital melalui proyek koding sederhana.	- Pelibatan orang tua dan komunitas. - Penggunaan bahasa pemrograman visual berbasis blok untuk proyek lintas mapel.	- Peningkatan kemampuan pendidik menggunakan teknologi pembelajaran. - Jumlah dan kualitas proyek koding sederhana, serta peningkatan literasi digital.
TAHAP 3 – MAJU	- Penguatan kualitas pembelajaran mendalam yang berpusat pada keterlibatan aktif dan refleksi murid. - Penerapan Asesmen autentik dan berkeadilan. - Perluasan kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan dunia kerja sebagai sumber belajar kontekstual. - Penerapan KKA tingkat lanjut melalui proyek KA sederhana dan pemecahan masalah nyata.	- Implementasi pembelajaran berbasis proyek, inkuiri, dan kolaboratif. - Pengembangan dan penerapan sistem penilaian portofolio dan proyek. - Penguatan peran pendidik sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. - Perluasan dan pemanfaatan kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan dunia kerja dalam pembelajaran.	- Tingkat keterlibatan murid dalam proyek nyata dan kontribusi komunitas. - Kemampuan murid merefleksikan proses belajar, menjelaskan keputusan, dan mempresentasikan hasil belajar. - Umpan balik dari orang tua, komunitas, dan mitra dunia kerja terhadap relevansi pembelajaran.



Tahap/Level	Fokus Pengembangan	Rencana Aksi	Evaluasi
		Pengembangan proyek Koding dan Kecerdasan Artifisial sederhana yang kontekstual dan relevan.	- Peningkatan kompetensi sosial-emosional dan karakter. - Kualitas proyek KA sederhana serta relevansinya dengan konteks nyata.
TAHAP 4 – UNGGUL	- Budaya belajar mendalam yang terinternalisasi (saling memuliakan, otonomi, refleksi). - Peran murid sebagai pembelajar mandiri dan pemimpin sebaya - Pendidik sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator. - Kepemimpinan pembelajaran transformatif dan ekosistem kolaboratif. - Satuan pendidikan menjadi rujukan inovasi KKA dan etika digital.	- Memposisikan satuan pendidikan sebagai pusat rujukan praktik baik PM melalui komunitas belajar profesional (KKG, MGMP, lokakarya, serta forum kolaboratif lintas satuan pendidikan). - Menguatkan kebijakan, tata kelola, dan jejaring lintas satuan pendidikan - Menggerakkan KKG/MGMP, lokakarya, dan forum kolaboratif lintas satuan pendidikan.	- Karya inovatif pendidik dan murid diakui regional/ nasional. - Partisipasi aktif pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagai narasumber/ mentor dalam jejaring profesional. - Keterlibatan dalam jejaring regional atau lebih luas. - Survei kepuasan komunitas terhadap peran satuan pendidikan.



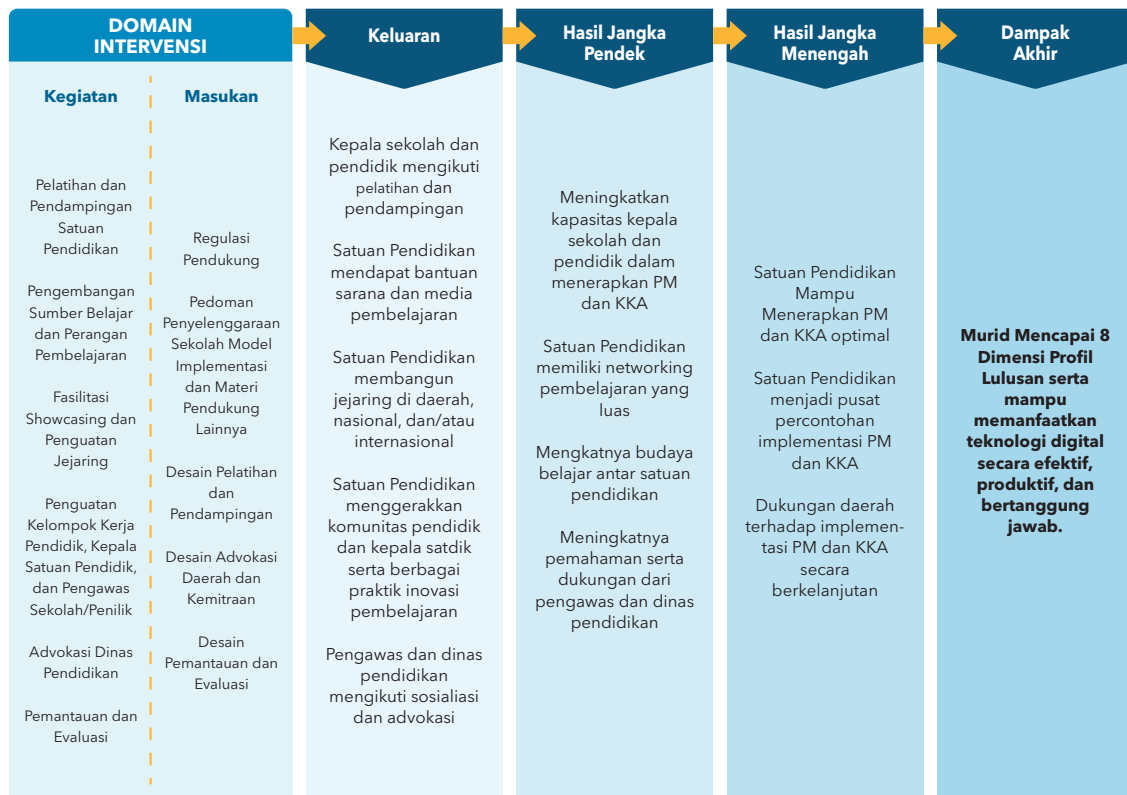
Tahap/Level	Fokus Pengembangan	Rencana Aksi	Evaluasi
		▪ <i>Mentorship</i> pembelajaran mendalam antar satuan pendidikan. ▪ Pengembangan proyek digital/KA berdampak sosial (IoT, lingkungan) dan pemanfaatan <i>maker space</i> untuk KKA.	▪ Dampak program pada peningkatan mutu pembelajaran & budaya belajar di lingkungan sekitar. ▪ Jumlah satuan pendidikan terimbas mentorship pembelajaran mendalam. ▪ Jumlah satuan pendidikan terimbas inovasi KKA dan kualitas produk digital/KA yang diimplementasikan.

B. Strategi Perubahan

Program Sekolah Model Implementasi PM dan KKA diharapkan dapat menjadi katalisator dalam akselerasi implementasi kebijakan PM serta pembelajaran KKA di daerah. Hal itu dapat terjadi apabila Sekolah Model Implementasi mampu menjadi rujukan, sumber belajar, serta dapat menggerakkan budaya belajar antarsatuan pendidikan. Pada akhirnya, ekosistem positif tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong tercapainya delapan dimensi profil lulusan serta kecakapan murid dalam menggunakan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

Dalam Pedoman Implementasi Pembelajaran Mendalam maupun Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (Kepmendikdasmen Nomor 126/P/2025 dan

Nomor 127/P/2025) disebutkan bahwa sekolah model merupakan program cepat (*quick win*) dan menjadi bukti keberhasilan konsep (*proof of concept*) yang dapat dilihat segera dampak positifnya, serta menjadi percontohan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Agar tujuan tersebut tercapai, maka perlu strategi perubahan yang memetakan jalur transformatif dari investasi sumber daya (*input dan activity*), perubahan-perubahan yang diharapkan, hingga tercapainya dampak pendidikan jangka panjang bagi murid (*impact*).



Gambar 3. Strategi Perubahan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA

Pada bagian dasar merupakan domain intervensi, yang terdiri dari input atau sumber daya serta *activity* atau program yang diberikan sebagai stimulasi awal. Input tersebut mencakup sumber daya fundamental yang memungkinkan pelaksanaan program atau kegiatan (*activity*). Input pertama adalah regulasi pendukung sebagai landasan pelaksanaan program. Implementasi program sekolah model saat ini berpegang pada Kepmendikdasmen Nomor 126/P/2025 dan Nomor 127/P/2025 yang merupakan pedoman implementasi Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.

Selanjutnya adalah panduan penyelenggaraan sekolah model dan materi pendukung lainnya. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan program Sekolah Model Implementasi bagi para pemangku kepentingan di tingkat



kementerian, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan. Input lainnya adalah desain pelatihan dan pendampingan, serta desain advokasi daerah dan kemitraan sebagai acuan intervensi langsung terhadap pendidik, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Terakhir adalah desain pemantauan dan evaluasi sebagai panduan dalam melakukan pemantauan perkembangan program dan memberikan masukan kebijakan berbasis bukti.



Activity adalah serangkaian program intervensi yang dilaksanakan untuk mengolah input menjadi hasil nyata (*output*). Dengan kata lain, hal ini merupakan inti dari implementasi program. Kegiatan utama pada bagian ini terdiri dari: 1) pelatihan dan pendampingan berkelanjutan yang diikuti oleh kepala sekolah dan pendidik; 2) pemberian bantuan sarana prasarana dan media pembelajaran; 3) fasilitasi kemitraan agar satuan pendidikan dapat membangun jejaring di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; 4) aktivasi kelompok kerja guru dan kepala sekolah; 5) advokasi terhadap pengawas dan dinas pendidikan; dan 6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Sekolah Model Implementasi umumnya telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang diberikan sebelum implementasi. Hal ini menjadi penguatan kapasitas awal bagi pendidik untuk mengimplementasikan PM serta pembelajaran KKA. Dalam praktiknya, meskipun pelatihan telah diberikan, pendidik masih menghadapi kendala dalam menerapkan praktik dalam pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi pendidik guna mendiskusikan kendala, mendapatkan umpan balik, serta memperbaiki strategi pembelajaran.

Dalam konteks Sekolah Model Implementasi, pelatihan dan pendampingan yang dimaksud merupakan kelanjutan dari pelatihan awal yang telah diikuti. Hal itu misalnya dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas lanjutan untuk pendidik dan kepala sekolah (*advanced training*), beasiswa pelatihan ke luar negeri, dan lain-lain. Kesempatan tersebut diperlukan untuk memberikan peluang kepada pendidik dan kepala sekolah untuk terus memperbarui kompetensi dan wawasan sehingga kualitas implementasi dalam pembelajaran makin optimal. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan juga dilakukan untuk membantu satuan pendidikan mengembangkan model implementasi pembelajaran yang lebih inovatif dan dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan lain.

Sarana dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor yang mendorong efektivitas pembelajaran di satuan pendidikan. Pada beberapa kondisi, ketersediaan sarana dan media pembelajaran yang memadai dapat mendorong pendidik mengoptimalkan pembelajaran yang diberikan, sekaligus mempercepat pemahaman siswa terhadap materi tertentu. Sarana dan media pembelajaran yang memadai memudahkan pendidik menemukan inovasi terbaik dari pembelajaran yang dipraktikkan di dalam kelas.

Dalam konteks Sekolah Model Implementasi, selain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bantuan sarana dan media pembelajaran juga harus dapat mendukung peran strategis satuan pendidikan sebagai sumber belajar bagi satuan pendidikan lain. Intervensi bantuan sarana dan prasarana ini dapat diselaraskan dengan program digitalisasi satuan pendidikan. Bantuan sarana dan media pembelajaran juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian lisensi perangkat lunak atau platform edukasi, integrasi ke *platform* nasional berbagi praktik baik (misalnya Ruang GTK), serta fasilitasi dokumentasi dan diseminasi praktik baik.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, belum semua satuan pendidikan mampu mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki. Kemitraan dengan pihak eksternal dapat meningkatkan kapasitas tambahan bagi satuan pendidikan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Kemitraan merupakan ruang pertukaran pengetahuan, inovasi, dan sumber daya. Penguatan kemitraan dapat dilakukan melalui fasilitasi kegiatan berbagi praktik inovasi dan menjalin kerja sama dengan satuan pendidikan atau mitra lain. Memberi kesempatan sebagai narasumber maupun peserta dalam seminar, konferensi, maupun pameran di tingkat daerah, nasional, hingga internasional dapat dilakukan untuk mendukung potensi kemitraan tersebut. Selain itu, upaya penguatan kemitraan ini dapat didukung dengan menyediakan platform atau kanal yang memungkinkan terbangunnya jejaring antarsatuan pendidikan (*learning community hub*), serta jejaring sekolah model dan pihak eksternal lainnya.

Agar Sekolah Model Implementasi dapat berperan sebagai sumber belajar dan menghidupkan ekosistem saling belajar antarsatuan pendidikan, maka perlu penguatan kelompok kerja guru dan



kepala sekolah. Dalam hal ini, kelompok kerja guru dan kepala sekolah menjadi forum kolaboratif untuk mempelajari dan berbagi praktik implementasi PM serta pembelajaran KKA. Aktivasi dan penguatan kelompok kerja guru dan kepala sekolah di setiap daerah dapat dilakukan oleh UPT Kemendikdasmen bermitra dengan dinas pendidikan untuk memastikan kegiatannya terencana, rutin, dan menjadi forum saling belajar dan berbagi.

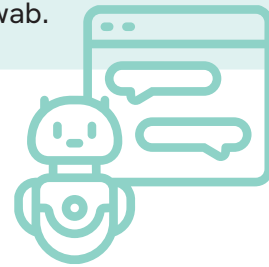


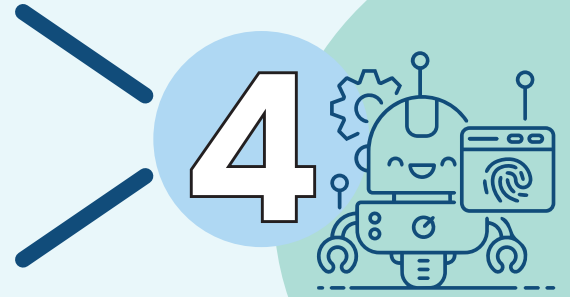
Untuk menjamin supaya implementasi sekolah model mendapat dukungan dan berjalan optimal, perlu dilakukan advokasi kepada pengawas dan dinas pendidikan melalui UPT Kemendikdasmen. Advokasi ini bertujuan agar pengawas dan dinas pendidikan memahami urgensi kebijakan penerapan PM serta pembelajaran KKA, menguatkan pemahaman terkait peran penting mereka dalam menyukseskan kebijakan, serta mendapatkan dukungan konkret guna mengoptimalkan program Sekolah Model Implementasi di daerah. Peran penting pengawas terutama mendampingi implementasi sekolah model, melakukan supervisi pembelajaran secara berkelanjutan, serta memfasilitasi forum belajar dan berbagi bersama antarsatuan pendidikan. Sementara dinas pendidikan berperan memberikan dukungan berupa kebijakan, program, dan penganggaran yang selaras dengan implementasi PM serta pembelajaran KKA.

Kegiatan lainnya sebagai pendukung program adalah pemantauan dan evaluasi yang berjalan paralel dengan pelaksanaan program. Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memahami berbagai kendala yang terjadi pada setiap tahapan untuk memberikan masukan perbaikan, serta mengetahui capaian program pada setiap tahapan dan dari waktu ke waktu. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu evaluasi implementasi, evaluasi proses dan konteks perubahan, dan evaluasi dampak. Evaluasi implementasi berupaya memahami bagaimana intervensi program dilakukan dan apakah sesuai dengan desain awal. Evaluasi proses dan konteks perubahan dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengapa proses intervensi dapat berhasil atau sebaliknya dengan memahami konteks dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara evaluasi dampak merupakan jenis evaluasi untuk mengetahui dampak jangka menengah hingga jangka panjang dari intervensi kebijakan. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum intervensi dan sesudah intervensi, maupun perbandingan dengan satuan pendidikan kontrol.



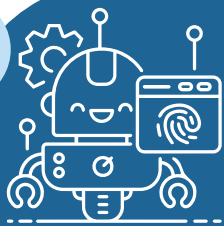
Melalui intervensi di atas, dalam jangka pendek, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam hal implementasi program, jejaring satuan pendidikan model makin luas, budaya belajar antarsatuan pendidikan makin berkembang, serta dukungan dari pengawas dan dinas pendidikan makin meningkat. Kondisi tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendorong pada dampak jangka menengah, yaitu Sekolah Model Implementasi dapat menerapkan PM serta KKA secara paripurna dan menjadi pusat percontohan. Hal itu juga diikuti dengan dukungan terhadap implementasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kian meningkat dan berkelanjutan. Melalui berbagai intervensi dan tahapan transformasi tersebut, dampak akhir yang diharapkan adalah tercapainya 8 Dimensi Profil Lulusan dan meningkatnya kemampuan murid dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif, produktif, dan bertanggung jawab.





Peran Pemangku Kepentingan





Bab.4

Peran Pemangku Kepentingan

Bab ini menguraikan peran dan rincian tugas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA. Penyusunan bab ini mengacu pada Kepmendikdasmen Nomor 126/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Kepmendikdasmen Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial, serta diperkaya dengan kerangka implementasi yang tercantum dalam Naskah Akademik PM dan Naskah Akademik KKA.

A. Struktur Organisasi Penyelenggara

1. Gugus tugas di tingkat pusat

Gugus tugas pusat meliputi unit-unit di lingkungan Kemendikdasmen (BSKAP, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTKPG, Ditjen Diksi PKPLK, dan Sekretariat Jenderal), yang bertanggung jawab atas arah kebijakan, penyusunan standar, pengembangan kurikulum, penyediaan bahan ajar, bimtek dan pelatihan nasional, pendampingan, penguatan kelompok kerja/komunitas belajar serta desain pemantauan dan evaluasi implementasi.

2. Gugus tugas di tingkat daerah (UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, UPT Ditjen GTKPG, dan UPT Ditjen Diksi PKPLK)

Gugus tugas daerah mencakup BBPMP/BPMP, BBGTK/BGTK/KGTK, dan BBPPMPV/BPPMPV. Peran gugus tugas di daerah berfokus pada koordinasi pelaksanaan kebijakan, supervisi teknis, fasilitasi bimtek dan komunitas belajar, pendampingan satuan pendidikan, serta penjaminan mutu implementasi PM dan KKA pada wilayah masing-masing.

3. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dinas pendidikan juga berperan untuk memastikan



setiap Sekolah Model Implementasi PM dan KKA memiliki pengawas sekolah/penilik sebagai pendamping.

4. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan pelaksana utama PM dan KKA, bertanggung jawab melakukan integrasi kebijakan ke dalam kurikulum satuan pendidikan, penyediaan lingkungan belajar yang aman-inklusif, penugasan pendidik sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar, serta pelaksanaan praktik pembelajaran, pemantauan internal, dan pelaporan kepada gugus tugas daerah dan pusat.

5. Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan berperan sebagai penyedia dukungan berupa pendanaan, keahlian, dan teknis untuk Sekolah Model Implementasi PM dan KKA sekaligus membantu penguatan kapasitas, memperkuat kolaborasi antar pihak, memberikan masukan, dan mendorong inovasi.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Gugus Tugas di Tingkat Pusat



Gugus Tugas di tingkat pusat bertanggung jawab mengembangkan kebijakan, menetapkan standar implementasi, menyediakan dukungan teknis nasional, menguatkan ekosistem pembelajaran, serta memastikan pemantauan, evaluasi, dan keberlanjutan program Sekolah Model Implementasi PM dan KKA. Gugus tugas ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa arah kebijakan nasional selaras dengan kesiapan daerah dan satuan pendidikan.

Masing-masing satuan kerja bertugas sebagai berikut:

a) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)

BSKAP bertanggung jawab pada standar, kurikulum, asesmen, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.



Rincian tugas:

- Mengembangkan standar kompetensi, standar proses, dan standar asesmen terkait PM dan KKA.
- Menyusun perangkat kurikulum, panduan implementasi, modul asesmen, dan contoh praktik baik.
- Mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan di tingkat pusat.
- Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan Kemendikdasmen untuk ditindaklanjuti bersama unit teknis.

b) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mengatur operasional Sekolah Model Implementasi PM dan KKA di satuan pendidikan dan daerah.

Rincian tugas:

- Menyiapkan norma, prosedur dan kriteria (NPK) pelaksanaan Program Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.
- Penetapan sekolah model implementasi PM dan KKA.
- Memperkuat tata kelola satuan pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana praktik pelaksanaan pembelajaran.
- Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian hasil belajar siswa sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.
- Pendampingan penjaminan mutu sekolah model implementasi PM dan KKA.
- Menyediakan asistensi teknis/advokasi implementasi PM dan KKA kepada pemangku kepentingan pada Dinas Pendidikan dan UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

c) Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG)

Ditjen GTK-PG bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk implementasi PM dan KKA.



Rincian tugas:

- Menyiapkan Norma, Prosedur, dan Kriteria (NPK) pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk implementasi PM dan KKA di Sekolah Model Implementasi;
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA berdasarkan hasil pemetaan;
- Menyiapkan desain dan perangkat pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model Implementasi pascabimtek PM dan KKA terkait praktik PM dan KKA, baik di satuan pendidikan maupun di kelompok kerja/komunitas belajar;
- Melaksanakan pelatihan berbasis kelompok kerja (Kepala satuan pendidikan, pendidik, pengawas, penilik) dengan metode In - On - In (Siklus TET);
- Menyusun desain serta perangkat supervisi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA terkait kegiatan pelatihan berbasis kelompok kerja serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk lainnya yang diselenggarakan UPT GTKPG;
- Melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelatihan berbasis kelompok kerja serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk lainnya yang diselenggarakan UPT GTKPG.
- Membangun kemitraan dengan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan lain baik lokal, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

d) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK)

Ditjen Diksi PKPLK bertanggung jawab atas tahapan penyelenggaraan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA di satuan Pendidikan serta memastikan relevansi PM dan KKA dengan konteks vokasi dan dunia kerja.

Rincian tugas:

- Menyiapkan norma, prosedur dan kriteria (NPK) pelaksanaan Program Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.
- Menetapkan sekolah model implementasi PM dan KKA.



- Menguatkan tata kelola satuan pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana praktik pelaksanaan pembelajaran.
- Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi untuk mendukung implementasi PM dan KKA di Sekolah Model Implementasi.
- Melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian hasil belajar murid sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.
- Melakukan pendampingan pembelajaran vokasional berbasis *Teaching Factory* di SMK dan pembelajaran kontekstual sesuai karakteristik satuan pendidikan pada SLB/SKh dan SKB/PKBM.
- Melaksanakan pendampingan penjaminan mutu pada sekolah model implementasi PM dan KKA.
- Menyediakan asistensi teknis/advokasi implementasi PM dan KKA kepada pemangku kepentingan pada Dinas Pendidikan dan UPT Ditjen Diksi, PKPLK.

e) Sekretariat Jenderal (Setjen)

Setjen mendukung tata kelola, infrastruktur data, dan pembiayaan implementasi PM dan KKA.

Rincian tugas:

- Mengelola dukungan administrasi, regulasi, dan pembiayaan untuk implementasi nasional.
- Mengembangkan dan memelihara platform digital pendukung pembelajaran serta pemantauan dan evaluasi.
- Menyediakan integrasi data dan sistem informasi bagi satuan pendidikan, daerah, dan unit utama.
- Memastikan ketersediaan sumber daya operasional dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan.

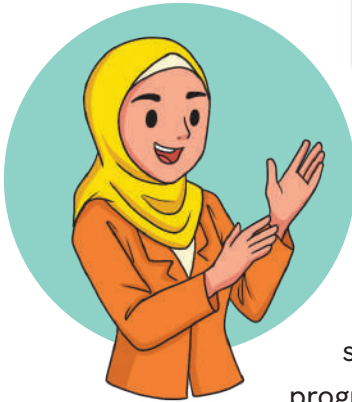


f) Inspektorat Jenderal (Itjen)

Itjen melakukan pengawasan internal pada satuan kerja penyelenggara Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.

Rincian tugas:

- Mengoordinasikan pengelolaan risiko implementasi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.
- Melakukan pengawasan implementasi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi.



2. Gugus Tugas di Tingkat Daerah

Gugus Tugas di tingkat daerah berfungsi sebagai penggerak implementasi, penyelaras kebijakan pusat-satuan pendidikan, koordinator pendampingan teknis, serta penjamin mutu pelaksanaan PM dan KKA di wilayah masing-masing. Unit daerah memastikan kesiapan satuan pendidikan, penyediaan pendamping, serta integrasi program ke dalam perencanaan daerah.

Masing-masing lembaga bertugas sebagai berikut:

a) UPT Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen membantu daerah memastikan bahwa pedoman teknis PM dan KKA diterapkan secara konsisten dan bermutu.

Rincian tugas:

- Melakukan pemetaan mutu Sekolah Model Implementasi.
- Memberikan asistensi serta supervisi kepada dinas pendidikan dan Sekolah Model Implementasi.
- Membantu melakukan pendampingan satuan pendidikan berfokus pada mutu pembelajaran untuk setiap tahapan perkembangan (pra berkembang, berkembang, maju, unggul).



- Memfasilitasi implementasi kurikulum dan asesmen PM sesuai panduan pusat.
- Membantu mendampingi penjaminan mutu sekolah model implementasi PM dan KKA
- Menjadi pusat konsultasi teknis untuk satuan pendidikan terkait PM dan KKA.
- Menyelenggarakan forum koordinasi, lokakarya teknis, serta pendampingan substansi program.
- Mengumpulkan data dampak implementasi PM dan KKA di lapangan.

b) UPT Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (UPT Ditjen GTKPG)

UPT Ditjen GTKPG berperan menyiapkan SDM pengajar, mentor, dan fasilitator daerah dalam implementasi PM dan KKA.

Rincian tugas:

- Membantu melakukan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model pascabimtek terkait praktik PM, baik di satuan pendidikan ataupun di kelompok kerja/komunitas belajar.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan berbagai strategi misalnya dapat berupa pelatihan, dan *coaching/mentoring*.
- Menyediakan fasilitator/pengajar/*coach*/mentor untuk pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Membantu melakukan pelatihan berbasis kelompok kerja (Kepsek, guru, pengawas, penilik) dengan metode In - On - In (Siklus TET) penguatan Pembelajaran Mendalam (PM), Berpikir Komputasional dan Kecerdasan Artifisial (BKKA)/Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA).
- Memastikan keberlanjutan pelatihan dan refleksi melalui pembelajaran berbasis komunitas.
- Mengembangkan sistem pelaporan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.



c) UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (UPT Ditjen Diksi PKPLK)

UPT ini mendukung Sekolah Model Implementasi, terutama SMK, SLB/SKh, dan SKB/PKBM yang menerapkan PM dan KKA.

Rincian tugas:

- Melakukan pemetaan mutu Sekolah Model Implementasi.
- Memberikan asistensi serta supervisi kepada dinas pendidikan dan Sekolah Model Implementasi.
- Memfasilitasi implementasi kurikulum dan asesmen PM sesuai panduan pusat.
- Menjadi pusat konsultasi teknis untuk satuan pendidikan terkait PM dan KKA.
- Menyelenggarakan forum koordinasi, lokakarya teknis, serta pendampingan substansi program.
- Mengumpulkan data dampak implementasi PM dan KKA di lapangan.
- Memfasilitasi pelatihan vokasional dan pengelolaan pendidikan vokasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan bersama industri dan mitra relevan.
- Mendukung penyelarasan kurikulum vokasi berbasis digital.
- Memastikan Sekolah Model Implementasi memperoleh pendampingan pembelajaran vokasional berbasis praktik nyata (*Teaching Factory*).
- Mengkoordinasikan keterlibatan dunia kerja lokal dalam pembelajaran.



3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan adalah pelaksana utama kebijakan PM dan KKA di daerah yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, konteks lokal, dan kapasitas satuan pendidikan.

Rincian tugas:

- Menyusun rencana implementasi PM dan KKA pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- Menetapkan Sekolah Model Implementasi berdasarkan asesmen kesiapan infrastruktur, pendidik, dan manajemen satuan pendidikan.
- Menyediakan pendamping teknis, fasilitator daerah, serta pengawas sekolah/penilik untuk mendukung proses implementasi.
- Memastikan integrasi PM dan KKA dalam perencanaan daerah (Renstra, RKPD, RKAS satuan pendidikan).
- Mengoordinasikan kemitraan daerah dengan komunitas, perguruan tinggi, dunia kerja, dan mitra pembangunan.
- Memastikan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA memiliki pengawas sekolah/penilik sebagai pendamping.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi daerah serta menyampaikan laporan kepada pusat.
- Menetapkan dukungan kebijakan daerah bagi pelaksanaan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA (Surat Keputusan Kepala Dinas).
- Memberikan izin dan fasilitasi pelatihan/pendampingan bagi satuan pendidikan sasaran.
- Menyelenggarakan forum diseminasi hasil dan praktik baik antarsatuan pendidikan.
- Melakukan pemantauan dan dukungan keberlanjutan program di wilayahnya.
- Mengintegrasikan hasil program ke dalam kebijakan dan program daerah.
- Menyediakan sumber daya bagi satuan pendidikan sasaran untuk mengakselerasi penerapan PM dan KKA.

4. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah pelaksana inti implementasi PM dan KKA, memastikan pembelajaran berlangsung efektif, otentik, kontekstual, dan berpusat pada murid.

Rincian tugas:

- Membentuk tim kerja di tingkat satuan pendidikan untuk mengawal implementasi.
- Mengintegrasikan PM dan KKA ke dalam kurikulum satuan pendidikan.



- Mengimplementasikan PM dan KKA dalam praktik pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan.
- Menyusun dan melaksanakan proyek pengembangan sesuai fokus program
- Menyediakan lingkungan pembelajaran kontekstual, aman, inklusif, dan berbasis pengalaman.
- Membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar PM dan KKA di satuan pendidikan.
- Mengelola komunitas belajar internal pendidik untuk refleksi dan penguatan praktik.
- Mengelola kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua, masyarakat, dan dunia kerja.
- Melaksanakan asesmen formatif dan sumatif berbasis PM dan KKA.
- Berpartisipasi aktif dalam pendampingan, refleksi, dan evaluasi program.
- Mendokumentasikan praktik baik dan melaporkan capaian implementasi secara berkala.
- Menyampaikan laporan perkembangan bulanan.
- Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi terkait PM dan KKA dalam kelompok kerja pendidik dan kepala sekolah di wilayahnya.

5. Mitra Pembangunan



Mitra pembangunan berperan memperkuat kualitas implementasi PM dan KKA melalui dukungan keilmuan, teknologi, inovasi pembelajaran, literasi digital, serta fasilitasi jejaring kolaboratif lintas sektor. Keterlibatan mereka memastikan keberlanjutan praktik, peningkatan kapasitas, serta perluasan dampak program di tingkat satuan pendidikan dan daerah.

Mitra pembangunan terdiri atas beberapa pihak dengan tugas sebagai berikut:

a) Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Perguruan tinggi berperan menyediakan basis keilmuan, riset terkini, dan inovasi pembelajaran untuk mendukung penguatan pedagogi PM dan KKA di satuan pendidikan.



Rincian tugas:

- Mengembangkan model pembelajaran PM, koding, dan literasi digital berbasis riset.
- Menyediakan pelatihan atau kursus daring terbuka (*Massive Online Open Course*-MOOC) dan lokakarya akademik untuk pendidik, kepala sekolah, dan pendamping.
- Mengembangkan bahan ajar, modul pelatihan, serta perangkat asesmen berbasis PM dan KKA.
- Berkolaborasi dengan Sekolah Model Implementasi untuk uji coba inovasi pembelajaran dan penelitian tindakan.
- Memberikan supervisi akademik, *mentoring*, atau *peer-review* terhadap implementasi program di satuan pendidikan.
- Berkontribusi dalam memberikan penguatan substansi di kelompok kerja guru dan kepala satuan pendidikan.

b) Dunia Kerja

Dunia kerja menyediakan konteks industri nyata untuk memperkaya penerapan PM dan KKA, baik bagi sekolah umum maupun SMK, SLB/SKh, dan SKB/PKBM dalam aspek literasi digital, KA, dan pengalaman kerja berbasis proyek.

Rincian tugas:

- Menyediakan kesempatan magang, studi kasus industri, proyek berbasis masalah, atau *bootcamp* bagi murid dan pendidik.
- Memberikan umpan balik praktis terkait kebutuhan kompetensi digital dan KA di dunia kerja.
- Mendukung pembelajaran kontekstual melalui *coaching*, *mentoring* profesional, dan kunjungan industri.
- Menyediakan instruktur ahli atau teknisi pendukung untuk topik koding, KA, atau literasi digital.
- Berkolaborasi dengan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan industri digital.



c) Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Komunitas Teknologi/Literasi Digital

NGO dan komunitas teknologi memperluas akses, menyediakan inovasi pembelajaran, serta mendukung pendampingan teknis di satuan pendidikan dan daerah, terutama pada wilayah yang kekurangan sumber daya.

Rincian tugas:

- Memberikan pelatihan, *workshop*, atau pendampingan literasi digital, koding, dan KA kepada pendidik dan murid.
- Mendukung satuan pendidikan melalui penyediaan platform digital, modul pembelajaran, dan *tools* teknologi pendukung.
- Mengadvokasi kebijakan pendidikan yang inklusif, terutama untuk pemanfaatan teknologi dan PM.
- Memfasilitasi komunitas belajar atau forum berbagi praktik baik antarsatuan pendidikan/daerah.
- Menyelenggarakan program pengayaan seperti *hackathon*, *digital challenge*, atau klub teknologi.

d) Media Massa dan Media Digital

Media berperan sebagai saluran komunikasi publik untuk meningkatkan *awareness*, literasi informasi, serta promosi praktik baik PM dan KKA di tingkat nasional maupun daerah.

Rincian tugas:

- Menyebarluaskan informasi program, cerita keberhasilan, dan model praktik baik dari Sekolah Model Implementasi.
- Menjadi mitra edukatif dalam menyediakan konten pembelajaran digital yang kredibel, aman, dan mendukung PM serta literasi digital.
- Mendukung kampanye publik mengenai pentingnya PM, koding, dan kecerdasan artifisial.
- Memfasilitasi publikasi hasil riset, inovasi, dan pencapaian Sekolah Model Implementasi.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan satuan pendidikan dalam produksi konten edukasi multiplatform.

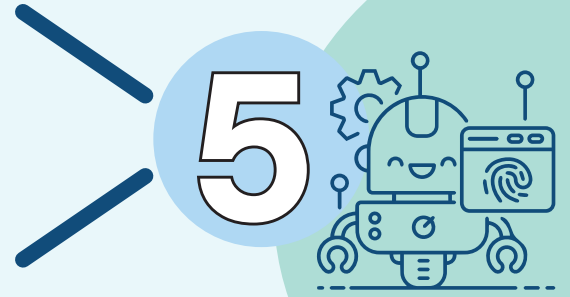
e) Mitra Lain yang Relevan (Komunitas, Lembaga Profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan)

Berbagai lembaga kemasyarakatan dan komunitas profesional memperkuat implementasi melalui dukungan sosial, kultural, dan profesional bagi satuan pendidikan dan pendidik.

Rincian tugas:

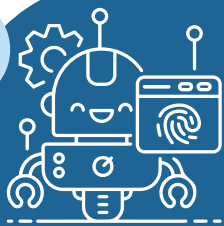
- Mendukung kegiatan satuan pendidikan melalui kerja sama komunitas (komunitas orang tua, kelompok profesi, kelompok literasi, dll.).
- Memberikan ruang kolaborasi dan dukungan logistik pada kegiatan pembelajaran kontekstual.
- Menyelenggarakan kegiatan edukatif berbasis masyarakat (*volunteering*, pembinaan karakter, literasi keluarga).
- Berkontribusi dalam inovasi lokal, konservasi budaya, atau program berbasis kearifan lokal yang relevan dengan PM.
- Menjadi mitra dalam penyediaan narasumber lokal atau tokoh masyarakat sebagai inspirator pembelajaran.





Mekanisme Penguatan Implementasi





Bab.5

Mekanisme Penguatan Implementasi

A. Pelatihan dan Pendampingan Satuan Pendidikan

Pelatihan dan pendampingan satuan pendidikan dilakukan untuk memastikan Sekolah Model Implementasi memperoleh dukungan substantif dan operasional dalam mengimplementasikan PM dan KKA.

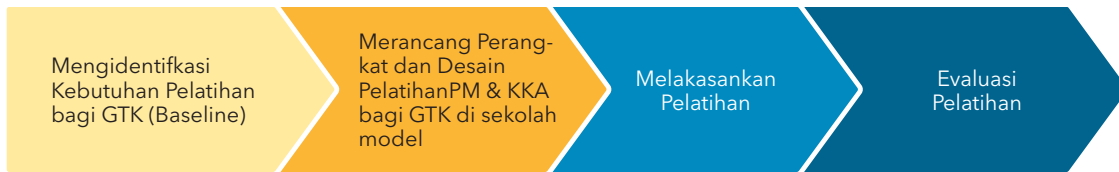
1. Pelatihan

Pelatihan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian dan peran Sekolah Model Implementasi, menyamakan persepsi dan memberikan penguatan tentang praktik pendekatan PM dan KKA, merefleksi perkembangan Sekolah Model agar dapat melaksanakan tindak lanjut di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Pelatihan dilakukan berbasis kelompok kerja (Kepsek, guru, pengawas, penilik) dengan metode In - On - In dengan siklus TET.

Ditjen GTKPG menyelenggarakan pelatihan PM dan pelatihan KKA bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model termasuk pengawas sekolah/penilik. Pelatihan yang dilakukan lebih bertujuan sebagai sarana penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan PM dan KKA. Pelatihan untuk pengawas sekolah/penilik juga mencakup kompetensi dalam melakukan pendampingan satuan pendidikan dan pendidik.



Strategi penyelenggaraan Pelatihan Ditjen GTKPG dilakukan secara bertahap sesuai pada gambar berikut.



Gambar 4. Strategi Penyelenggaraan Pelatihan

a) Mengidentifikasi kebutuhan Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model Implementasi

Identifikasi kebutuhan Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model dilakukan berdasarkan pemetaan tahap pengembangan Sekolah Model. Pemetaan ini dijadikan dasar *baseline* Sekolah Model, untuk dijadikan acuan/ dasar intervensi bagi Sekolah Model. Intervensi bagi Sekolah Model disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Model.

b) Merancang desain dan perangkat Pelatihan PM dan KKA bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model

Sebelum pelaksanaan Pelatihan PM dan KKA bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model, Ditjen GTKPG menyusun rancangan desain dan perangkat Pelatihan PM dan KKA bagi Sekolah Model. Perangkat tersebut antara lain panduan tentang pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Model, modul, LMS, video praktik baik, serta perangkat lainnya. Dalam merancang perangkat pelatihan, Ditjen GTKPG dapat dibantu oleh BSKAP.

c) Melaksanakan Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan sesuai kebutuhan Sekolah Model. Pelatihan dilakukan terhadap pendidik, kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/penilik Sekolah Model. Pelatihan dilakukan oleh unit utama yaitu Ditjen GTKPG. Pelatihan untuk pendidik Jenjang PAUD dan PNF diselenggarakan oleh Direktorat Guru PAUD dan PNF; Pelatihan untuk pendidik Jenjang SD dan SMP diselenggarakan oleh Direktorat Guru Dikdas; Pelatihan untuk pendidik Jenjang SMA, SMK dan SLB diselenggarakan oleh Direktorat Guru PMPK; Pelatihan untuk kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah diselenggarakan oleh Direktorat KSPSTK; dan Pelatihan untuk kepala satuan PNF dan penilik diselenggarakan oleh Direktorat Guru PAUD dan PNF.

d) Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan

Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan dilakukan untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan ketercapaian tujuan penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan desain dan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi perbaikan Pelatihan dan tindak lanjut pascapelatihan. Evaluasi Pelatihan dilakukan oleh Ditjen GTKPG dan PSKP BSKAP.

Pemerintah daerah, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dapat pula menyelenggarakan Pelatihan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bentuk partisipasi semesta.

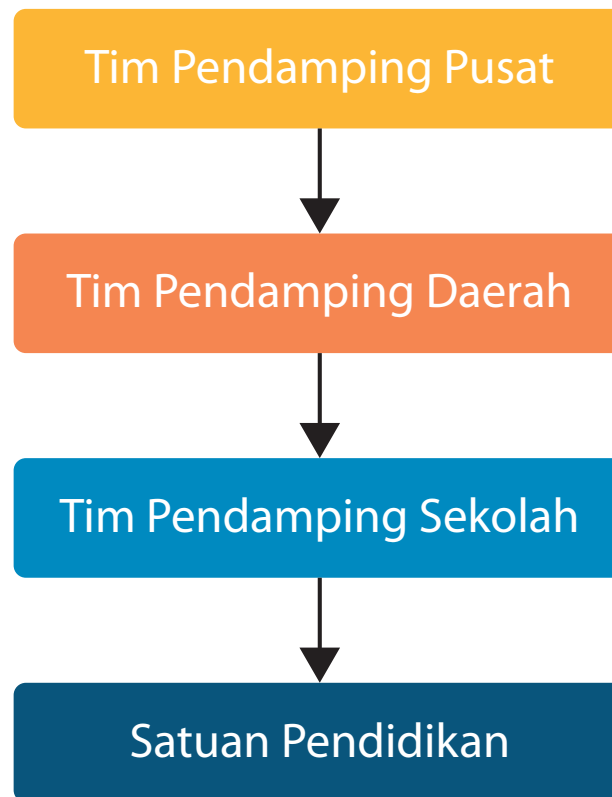
2. Pendampingan

Pendampingan adalah proses pemberian dukungan intensif kepada pelaksana program untuk memastikan program berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendampingan menekankan pada fasilitasi, penguatan kapasitas, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Pendampingan satuan pendidikan utamanya dilakukan oleh pengawas sekolah/penilik di mana pengawas sekolah/penilik memfasilitasi proses transformasi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA melalui pengalaman langsung, praktik, dan refleksi. Pendampingan yang dilakukan pengawas sekolah/penilik juga menjadi bagian dari *teacher experimental training* (penguatan kompetensi pendidik yang berbasis eksperimen pengajaran). Pendampingan satuan pendidikan berfokus pada mutu pembelajaran untuk setiap tahapan perkembangan (pra berkembang, berkembang, maju, unggul).

Pada level Kementerian, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Ditjen Diksi PKPLK melakukan sosialisasi kebijakan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA. Sosialisasi dapat dilakukan kepada UPT, Dinas Pendidikan, atau satuan pendidikan. Informasi yang dapat disampaikan dalam sosialisasi antara lain konsep Sekolah Model, target implementasi, kriteria, dan fasilitasi yang dilakukan. Sosialisasi kepada UPT bertujuan untuk memberikan penguatan kepada UPT sebagai satuan kerja Kementerian di daerah. Sementara, Sosialisasi kepada Dinas Pendidikan dapat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan menjaga keberlangsungan Sekolah Model ini kedepannya. Dalam merancang perangkat sosialisasi, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Ditjen Diksi PKPLK dapat dibantu oleh BSKAP.



Dalam melaksanakan pendampingan ke sekolah, perlu dibentuk Tim Pendamping Sekolah Model yang selanjutnya diberikan pembekalan yang standar.



Gambar 5. Tim Pendamping Sekolah Model

Pemerintah daerah, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dapat pula menyelenggarakan pendampingan pada Sekolah Model Implementasi PM dan KKA sebagai bentuk partisipasi semesta.

Pendampingan dapat dilakukan secara klasikal maupun non klasikal. Pendampingan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, dalam jaringan, dan/atau kombinasi. Pendampingan klasikal terdiri atas: pelatihan, bimbingan teknis, workshop atau lokakarya, seminar/konferensi/sarasehan, sosialisasi; dan/atau bentuk klasikal lainnya. Pendampingan nonklasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Pendampingan nonklasikal dapat dilakukan melalui fasilitasi pembelajaran mandiri, *mentoring*, dan/atau *coaching* untuk diintegrasikan dengan pelatihan klasikal yang dilakukan.

Jenis pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Model. Jika terdapat tujuan yang sama pada beberapa Sekolah Model maka dilakukan pendampingan

secara klasikal atau berkelompok; namun jika terdapat kondisi khusus pada suatu satuan pendidikan, maka dapat dilakukan pendampingan non klasikal dalam bentuk pendampingan individual. Setiap satuan pendidikan dapat menerima baik pendampingan klasikal maupun non klasikal.

B. Pengembangan Sumber Belajar dan Perangkat Pembelajaran

Sekolah Model Implementasi PM dan KKA perlu didukung oleh sumber belajar dan perangkat pembelajaran. Penyediaan sumber belajar dan perangkat pembelajaran dapat diberikan dari Kementerian, Pemerintah Daerah, mitra, atau pemangku kepentingan lainnya.

Pada level Kementerian, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Ditjen Diksi PKPLK dapat memberikan fasilitasi implementasi pada Sekolah Model berupa sarana dan prasarana pembelajaran, penyusunan contoh inspirasi perencanaan pembelajaran, dan konten pembelajaran lainnya. Ditjen GTKPG melakukan pemerikayaan konten inspirasi pembelajaran berupa contoh praktik mengajar, praktik kepemimpinan satuan pendidikan dan praktik kepengawasan sekolah. BSKAP sesuai tugas dan fungsinya melakukan penyusunan dan penilaian buku teks serta buku nonteks, inspirasi perencanaan pembelajaran, panduan mata pelajaran, dan model kurikulum satuan pendidikan terkait PM dan KKA. Seluruh konten pembelajaran dan inspirasi pengajaran dapat diunggah melalui *platform* Rumah Pendidikan, sistem informasi perbukuan, atau sistem informasi kurikulum Kementerian.



Pemerintah daerah, mitra, yayasan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat pula menyediakan perangkat pembelajaran, sumber belajar, dan inspirasi perencanaan pembelajaran. Penyusunan inspirasi perencanaan pembelajaran dan sumber belajar bagi Sekolah Model sekurangnya merujuk pada regulasi, naskah akademik, dan panduan yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian.



C. **Fasilitasi *Showcasing* dan Penguatan Jejaring**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sekolah Model Implementasi PM dan KKA ini berfungsi sebagai laboratorium inovasi pembelajaran dan percontohan implementasi kebijakan. Percontohan ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan untuk menempatkan satuan pendidikan tersebut pada “etalase” yang dapat dipelajari satuan pendidikan lainnya. *Showcasing* dalam konteks Sekolah Model Implementasi PM dan KKA adalah upaya untuk mempromosikan satuan pendidikan sebagai praktik baik, di mana satuan pendidikan lain dapat belajar baik secara langsung maupun tidak langsung dari satuan pendidikan tersebut.

Sebagai penghargaan bagi kontribusi Sekolah Model untuk berbagi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkolaborasi untuk memfasilitasi penguatan jejaring satuan pendidikan guna peningkatan mutu berkelanjutan. Penguatan jejaring tersebut dapat berbentuk jejaring antar sekolah model, jejaring dengan satuan pendidikan di luar negeri, perguruan tinggi, NGO, atau mitra dunia kerja.

D. **Penguatan Kelompok Kerja Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah/Penilik**

Kelompok kerja guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik merupakan wadah strategis untuk membangun kolaborasi, berbagi praktik baik, serta memastikan bahwa pendidikan semua murid, menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kelompok kerja, pendidik dan tenaga kependidikan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan bersama-sama mengembangkan kompetensi, menyelaraskan praktik, dan memperkuat mutu layanan pendidikan satuan pendidikan. Optimalisasi kelompok kerja/komunitas belajar dilakukan dengan pendekatan inkuiri kolaboratif. Pendekatan tersebut untuk memastikan bahwa setiap proses belajar bersama untuk memberikan dampak bagi pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui pendekatan ini, pendidik dan tenaga

kependidikan berkolaborasi dalam mengidentifikasi tantangan di satuan pendidikan, merancang, dan mengimplementasikan rencana solusi, serta merefleksikan hasilnya. Proses ini membantu pendidik dan tenaga kependidikan tumbuh dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran murid.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi kelompok kerja, gugus pusat memiliki peran sebagai berikut. Ditjen GTKPG bersama UPT Ditjen GTKPG dan Ditjen Diksi PKPLK bersama UPT Ditjen Diksi PKPLK bertugas menyiapkan fasilitator kelompok kerja/komunitas belajar tersebut sesuai kebutuhan. Jika kelompok kerja dilakukan per mata pelajaran, maka disiapkan fasilitator per mata pelajaran seperti kelompok kerja untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dapat mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya, melalui penerbitan regulasi atau edaran pemerintah daerah terkait hari belajar pendidik atau menyiapkan wadah berbagi praktik baik di level kecamatan/kabupaten/kota/provinsi. BSKAP melalui PSKP melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kelompok kerja, sedangkan Sekretaris Jenderal dalam hal ini Pusdatin memastikan adanya sistem pemantauan pelaksanaan kelompok kerja.

E. Advokasi Dinas Pendidikan

Advokasi merupakan kegiatan untuk memberikan dukungan bagi pelaksana program guna menyukseskan Sekolah Model Implementasi PM dan KKA. Advokasi pada Dinas Pendidikan dapat mendorong keberlangsungan dari program Sekolah Model. Dinas Pendidikan yang telah diadvokasi selanjutnya dapat melakukan advokasi pada pemangku kepentingan lain yang terjangkau kewenangannya.

Pada level Kementerian, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Ditjen Diksi PKPLK dapat memberikan advokasi pada Dinas Pendidikan untuk mengembangkan regulasi di tingkat daerah serta melakukan fasilitasi atau memberikan bantuan pada satuan pendidikan. Advokasi pada Dinas Pendidikan juga mencakup pengawas sekolah/penilik. Pengawas sekolah/penilik memegang peranan penting



dalam pendampingan secara langsung dan berkala pada Sekolah Model. Berbeda dengan dua unit utama sebelumnya, Ditjen GTKPG melakukan advokasi yang bersifat substantif pada konten dan praktik pedagogis. Materi advokasi unit utama Kementerian dapat dikembangkan bersama satuan kerja pada BSKAP.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program Sekolah Model Implementasi PM dan KKA secara komprehensif. Pemantauan adalah kegiatan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi masalah, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan korektif, sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan program dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemantauan umumnya dilakukan saat program berlangsung.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas program penguatan implementasi yaitu 1) pelatihan dan pendampingan berkelanjutan yang diikuti oleh kepala satuan pendidikan dan pendidik; 2) pemberian bantuan sarana prasarana dan media pembelajaran; 3) fasilitasi kemitraan agar satuan pendidikan dapat membangun jejaring di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; 4) aktivasi kelompok kerja/komunitas belajar pendidik; dan 5) advokasi pengawas dan dinas pendidikan. Proses ini bertujuan memverifikasi bahwa seluruh tahapan kegiatan, telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pemantauan dilaksanakan di tengah pelaksanaan program.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program, memberikan justifikasi, serta menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan keputusan penting seperti meneruskan, memperbaiki, memperluas, atau menghentikan program, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan yang diharapkan dan peningkatan mutu di masa mendatang. Evaluasi dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, diantaranya melalui:

1

Evaluasi *Immediate Outcome*: Dilakukan pascapelaksanaan intervensi program melalui metode *self-assessment* untuk mengukur peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan, pendidik, pengawas, dan dinas pendidikan. Fokus utamanya adalah menilai kesiapan penerapan PM dan KKA, *networking* pembelajaran yang luas, serta terbangunnya budaya belajar antarsatuan pendidikan

2

Evaluasi *Intermediate Outcome*: Dilakukan dua tahun pascapelaksanaan intervensi program. Tahap ini dilakukan dengan survei serta wawancara dan observasi untuk melihat kebermanfaatan program secara mendalam. Tujuannya adalah memastikan satuan pendidikan dapat menerapkan PM dan KKA dengan baik, satuan pendidikan mampu menjadi percontohan dan menilai konsistensi dukungan daerah terhadap keberlanjutan program.

3

Evaluasi *Impact*: Merupakan pengukuran akhir yang difokuskan pada siswa. Keberhasilan program dinilai berdasarkan ketercapaian 8 Dimensi Profil Lulusan dan kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap menjadi bahan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat menjadi bahan berbagi praktik baik penerapan PM dan KKA untuk satpen, dinas pendidikan, dan pengawas di berbagai daerah.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi Sekolah Model Implementasi PM dan KKA dapat merujuk pada kriteria keberhasilan.



Glosarium

- Kecerdasan Artifisial : Bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami.
- Koding : Praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet-based, plugged, dan unplugged.
- Pembelajaran Mendalam : Pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.
- Unit Pelaksana Teknis : Unit kerja mandiri di bawah Kementerian yang bertugas melaksanakan fungsi teknis operasional atau penunjang spesifik serta berfungsi sebagai “kepanjangan tangan” Kementerian di daerah untuk memberikan pelayanan langsung.

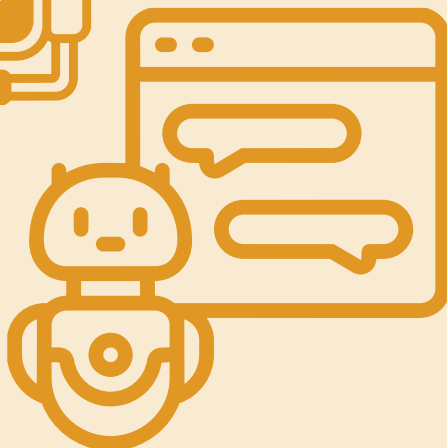
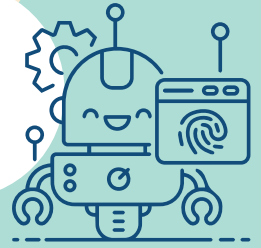
Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Internet APJII 2023*. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indikator Pendidikan di Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Chmielewski, A. K. (2019). The Global Increase in the Socioeconomic Achievement Gap, 1964 to 2015. *American Sociological Review*, 84(3), 517-544.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep Learning: Engage the World Change the World*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). (2025). *Program Digital Talent Scholarship 2025*. Jakarta: Kemenkomdigi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). *Peringkat Indonesia pada PISA 2022 Naik 5-6 Posisi Dibanding 2018*. Siaran Pers Nomor 697/sipers/A6/XII/2023. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Object Management Group (OMG). (2010). MDA Foundation Model. Needham, MA, USA: Object Management Group. ORMSC/2010-09-06.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing.
- Partnership for 21st Century Skills. (2009). *Framework for 21st Century Learning*. Washington, DC: P21.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Riady, S. dkk. (2025). Naskah akademik pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Suyanto, dkk. (2025). Naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Jakarta: Kemendikdasmen.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

World Bank & McKinsey & Company. (2019). *Digital Skills in Indonesia: Strategic Framework and Roadmap*. Washington, DC: World Bank.

World Economic Forum (WEF). (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva: World Economic Forum.

Lampiran



Lampiran

A. Kriteria Keberhasilan Implementasi Pembelajaran Mendalam

Kriteria keberhasilan Implementasi Pembelajaran Mendalam dibagi ke dalam aspek Keunggulan Belajar Murid, Keunggulan Mengajar Pendidik, dan Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan.

1. Keunggulan Belajar Murid

Aspek Keunggulan Belajar Murid memiliki beberapa dimensi, yaitu Budaya Belajar dan Capaian Belajar. Indikator pada 2 dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Kriteria Keberhasilan Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Aspek Keunggulan Belajar Murid

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Budaya Belajar				
Memuliakan	Murid belum konsisten menunjukkan sikap menghargai guru dan sesama murid dalam tutur kata maupun perilaku	Murid menunjukkan sikap menghargai guru dan sesama murid, namun masih perlu sering diingatkan dan dibimbing.	Murid secara mandiri menunjukkan sikap menghargai guru dan sesama murid melalui tutur kata dan perilaku yang sopan.	Murid secara konsisten menjadi teladan dalam menghargai guru dan sesama murid, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap saling menghormati.

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Berkesadaran	Murid belum nyaman belajar dan sulit berkonsentrasi; belum menyadari cara berpikirnya; belum aktif terlibat; masih bergantung pada arahan guru; dan rasa ingin tahu masih rendah.	Murid mulai nyaman belajar dan sesekali berkonsentrasi; mulai menyadari proses berpikirnya; menggunakan kesempatan memilih dengan bimbingan; dan rasa ingin tahu mulai tumbuh.	Murid nyaman belajar, mampu berkonsentrasi, percaya diri dan mulai mandiri; menyadari proses berpikirnya; dapat menentukan pilihan dengan alasan jelas; terbuka pada ide baru; dan aktif ingin tahu.	Murid nyaman belajar, berkonsentrasi, mandiri dan reflektif; mampu menyesuaikan strategi belajar; memiliki alasan kuat atas pilihannya; dan mengeksplorasi hal-hal baru secara terbuka dan proaktif
Bermakna	Murid belum mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata; belum terlibat dalam penyelesaian masalah; belum mengaitkan dengan pengalaman atau materi pelajaran lain; dan belum menunjukkan sikap ingin terus belajar.	Murid mulai mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata; terlibat dalam menyelesaikan masalah sederhana; mulai menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan mata pelajaran lain; dan mulai menyadari pentingnya terus belajar.	Murid mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata; aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya; menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dan bidang lain; dapat menerapkan pembelajaran pada situasi baru; dan mulai menunjukkan sikap pembelajar sepanjang hayat.	Murid secara konsisten mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata secara terintegrasi lintas bidang; proaktif menyelesaikan masalah; menerapkan pengetahuan di berbagai situasi dan konteks; dan konsisten menunjukkan semangat belajar sepanjang hayat.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Menggembirakan	Murid kurang tertarik pada pembelajaran dan belum merespon pada tantangan; belum merasakan momen keberhasilan belajar; dan belum mendapat kesempatan berkreasi.	Murid tertarik pada pembelajaran dan mulai merespon tantangan; sesekali mengalami momen keberhasilan belajar; dan mulai memanfaatkan kesempatan untuk berkreasi.	Murid tertarik pada dan terinspirasi oleh pembelajaran; merespons tantangan; sering mengalami momen keberhasilan belajar; dan memanfaatkan kesempatan untuk berinisiatif serta berkreasi.	Murid tertarik pada dan terinspirasi oleh pembelajaran, bersemangat menghadapi tantangan; selalu merasakan momen keberhasilan belajar, dan memanfaatkan banyak kesempatan untuk berkreasi.
Otonomi Belajar	Murid hanya mengikuti instruksi dan sangat bergantung pada arahan guru. Belum mampu menentukan strategi belajar sendiri.	Murid merencanakan dan memilih strategi belajar sesuai kebutuhan dan target belajarnya, namun masih memerlukan banyak bimbingan.	Murid secara mandiri merencanakan, memilih, dan menyesuaikan strategi belajar sesuai kebutuhan dan target belajarnya, namun belum konsisten.	Murid secara konsisten mandiri dalam merencanakan, memilih, dan menyesuaikan strategi belajar sesuai kebutuhan dan target belajarnya.
Refleksi	Murid belum terbiasa melakukan refleksi dan masih bergantung pada arahan guru dalam mengatur belajarnya.	Murid membiasakan diri melakukan refleksi; mulai menunjukkan motivasi belajar; dan mengelola cara belajarnya dengan bimbingan guru	Murid sering melakukan refleksi; mengelola strategi belajarnya dengan bimbingan; dan menunjukkan motivasi dan regulasi diri.	Murid secara konsisten melakukan refleksi; mengelola strategi belajarnya secara mandiri; dan menunjukkan motivasi dan regulasi diri yang kuat.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
-----------	---------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

Capaian Belajar

Dimensi Profil Lulusan	Murid belum menunjukkan pencapaian profil lulusan sesuai dengan tingkat belajarnya	Murid mulai menunjukkan pencapaian profil lulusan sesuai dengan tingkat belajarnya, namun penerapannya masih situasional dan membutuhkan arahan guru.	Murid belum konsisten menunjukkan ketercapaian profil lulusan sesuai dengan tingkat belajarnya secara mandiri di dalam sekolah	Murid secara konsisten menunjukkan ketercapaian profil lulusan sesuai dengan tingkat belajarnya secara mandiri di dalam dan di luar sekolah
-------------------------------	--	---	--	---



2. Keunggulan Mengajar Pendidik

Aspek Keunggulan Mengajar Pendidik memiliki beberapa dimensi, yaitu Mengajar secara Efektif, Asesmen Otentik dan Berkeadilan, dan Pengembangan Diri. Indikator pada 3 dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Kriteria Keberhasilan Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Aspek Keunggulan Mengajar Pendidik

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Mengajar secara Efektif				
Memuliakan	Guru belum menghargai keberagaman murid dan pembelajaran yang dikelola belum responsif terhadap perbedaan kebutuhan belajar dan potensi murid.	Guru mulai menghargai dan memperlakukan murid secara adil; berupaya menciptakan suasana aman dan nyaman; mengelola pembelajaran secara responsif, namun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh murid.	Guru menjadi teladan dalam menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta responsif terhadap kebutuhan belajar dan potensi murid.	Guru secara konsisten menjadi teladan dan menginspirasi dalam menghargai keberagaman, membangun budaya saling menghormati, dan secara adaptif mengelola pembelajaran yang inklusif serta responsif bagi seluruh murid.
Pengelolaan Pembelajaran	Guru mulai mengelola pembelajaran yang memotivasi; namun belum menggunakan pendekatan kontekstual	Guru mengelola pembelajaran yang memotivasi; menggunakan pendekatan kontekstual, namun belum terpadu; dan	Guru mengelola pembelajaran yang memotivasi; menggunakan pendekatan kontekstual	Guru mengelola pembelajaran yang memotivasi dan menginspirasi; menggunakan pendekatan kontekstual, terpadu, dan adaptif; serta

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
	dan terpadu; dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif.	menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, namun belum responsif.	dan terpadu, namun belum selalu adaptif; dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif.	menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif secara otonom.
Refleksi	Guru melakukan refleksi terhadap pengelolaan pembelajaran, namun belum berbasis asesmen dan bukti lainnya	Guru melakukan refleksi terhadap pengelolaan pembelajaran berbasis asesmen dan bukti lainnya. Namun, refleksi masih bersifat deskriptif dan belum menghasilkan keputusan atau tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang sistematis.	Guru melakukan refleksi terhadap pengelolaan pembelajaran berbasis asesmen dan bukti lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan profesionalisme, namun belum membangun budaya reflektif sebagai pembelajar sepanjang hayat.	Guru konsisten melakukan refleksi terhadap pengelolaan pembelajaran berbasis asesmen dan bukti lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan profesionalisme, dan membangun budaya reflektif sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Asesmen Otentik dan Berkeadilan

Formatif	Guru melaksanakan asesmen formatif, namun belum	Guru secara insidental melaksanakan asesmen formatif, memberikan dan	Guru secara sistematis melaksanakan asesmen formatif, memberikan dan	Guru secara sistematis melaksanakan asesmen formatif, memberikan dan
-----------------	---	--	--	--



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
	memberikan dan memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan belum memfasilitasi murid melakukan asesmen diri dan/ atau antar murid yang mendukung regulasi diri.	memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan belum memfasilitasi murid melakukan asesmen diri dan/atau antar murid yang mendukung regulasi diri.	memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memfasilitasi murid melakukan asesmen diri dan/atau antar murid yang mendukung regulasi diri namun belum konsisten	memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memfasilitasi murid melakukan asesmen diri dan/atau antar murid yang mendukung regulasi diri.
Sumatif	Guru melaksanakan asesmen sumatif, namun belum otentik maupun holistik; belum menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya; dan belum melibatkan murid untuk menganalisis hasil secara reflektif	Guru melaksanakan asesmen sumatif, baik secara otentik maupun holistik namun belum konsisten; mulai menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya; dan mulai melibatkan murid untuk menganalisis hasil secara reflektif	Guru melaksanakan asesmen sumatif, baik secara otentik maupun holistik; menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya; namun belum secara konsisten melibatkan murid untuk menganalisis hasil secara reflektif	Guru secara konsisten melaksanakan asesmen sumatif, baik secara otentik maupun holistik; menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya; dan melibatkan murid untuk menganalisis hasil secara reflektif.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Pengembangan Diri				
Belajar secara Mandiri	Guru mulai mengembangkan kompetensi, belum konsisten menerapkan pembelajaran mendalam, dan mulai melakukan refleksi dan kolaborasi	Guru mengembangkan kompetensi secara insidental, belum konsisten menerapkan pembelajaran mendalam, mulai melakukan refleksi dan kolaborasi	Guru mengembangkan kompetensi secara terencana, namun belum konsisten menerapkan pembelajaran mendalam; melakukan refleksi dan kolaborasi yang belum berdampak secara signifikan pada kemandirian guru dan kualitas belajar murid.	Guru mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan dan secara konsisten menerapkan pembelajaran mendalam; melakukan refleksi dan kolaborasi yang berdampak nyata pada kemandirian guru dan kualitas belajar murid.
Belajar bersama Komunitas	Guru mulai membangun kemitraan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif dengan beberapa pihak agar pembelajaran lebih kontekstual namun belum berkontribusi aktif dalam komunitas profesi	Guru membangun kemitraan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif dengan beberapa pihak agar pembelajaran lebih kontekstual dan mulai berkontribusi aktif dalam komunitas profesi	Guru membangun kemitraan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif dengan berbagai pihak agar pembelajaran lebih kontekstual dan berkontribusi aktif dalam komunitas profesi	Guru membangun kemitraan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif dengan berbagai pihak secara sistemik agar pembelajaran lebih kontekstual; serta berkontribusi aktif dalam komunitas profesi dan menginspirasi rekan sejawat



3. Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan

Aspek Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan memiliki beberapa dimensi, yaitu Kepemimpinan Pembelajaran Mendalam, Pengelolaan Sumber Daya, Kemitraan dan Ekosistem Pembelajaran, dan Pemanfaatan Teknologi Digital. Indikator pada dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Kriteria Keberhasilan Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Aspek Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Kepemimpinan Pembelajaran Mendalam				
Memimpin Implementasi PM	Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas administrasi dan pengelolaan sekolah, namun belum secara jelas memimpin implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran Mendalam belum terintegrasi dalam perencanaan dan praktik pelaksanaan di sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan mulai memimpin implementasi pembelajaran mendalam untuk mencapai profil lulusan, telah menyusun rencana implementasi, namun pelaksanaannya belum konsisten dan masih terbatas pada program tertentu.	Kepala Satuan Pendidikan secara konsisten memimpin implementasi pembelajaran mendalam dalam pengelolaan dan budaya sekolah, dan mendukung pencapaian profil lulusan secara terencana sistematis.	Kepala Satuan Pendidikan sebagai pemimpin transformasional yang memastikan implementasi pembelajaran mendalam secara terarah, terpadu dan efektif, terinternalisasi dalam budaya sekolah dan berdampak nyata pada kualitas profil lulusan.

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Menyelaraskan Visi Misi Sekolah dengan PM Bersama Pemangku Kepentingan	Kepala Satuan Pendidikan belum secara jelas memimpin penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah yang selaras dengan Pembelajaran Mendalam, dan belum ada keterlibatan pemangku kepentingan.	Kepala Satuan Pendidikan mulai memimpin penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah agar selaras dengan Pembelajaran Mendalam dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah agar selaras dengan Pembelajaran Mendalam, dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif	Kepala Satuan Pendidikan memimpin penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah agar selaras dengan pembelajaran mendalam, secara partisipatif dan komprehensif, dan diimplementasikan bersama seluruh pemangku kepentingan.
Melakukan Supervisi Instruksional PM	Kepala Satuan Pendidikan mulai melakukan supervisi pembelajaran, namun masih bersifat administratif dan belum secara sistematis mengamati praktik pembelajaran mendalam di kelas. Umpan balik kepada guru masih terbatas dan belum berbasis bukti pembelajaran murid maupun refleksi bersama.	Kepala Satuan Pendidikan melakukan supervisi pembelajaran secara lebih terstruktur melalui observasi kelas dan pemberian umpan balik kepada guru. Supervisi mulai memperhatikan praktik pembelajaran berpusat pada murid dan penggunaan bukti pembelajaran, namun belum dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari siklus peningkatan kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan supervisi instruksional secara sistematis melalui observasi kelas, dialog reflektif, dan pemberian umpan balik konstruktif kepada guru. Supervisi berfokus pada penguatan praktik Pembelajaran Mendalam yang berpusat pada murid dan menggunakan bukti pembelajaran sebagai dasar perbaikan praktik mengajar.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin sistem supervisi instruksional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran Mendalam. Supervisi dilakukan melalui observasi kelas, refleksi profesional, dan coaching kepada guru, berbasis bukti pembelajaran murid, serta melibatkan komunitas belajar guru untuk memastikan peningkatan praktik pembelajaran yang berdampak nyata pada hasil belajar murid.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Memimpin Refleksi	Kepala Satuan Pendidikan belum secara aktif menumbuhkan budaya reflektif, serta belum mendorong guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran	Kepala Satuan Pendidikan mulai menumbuhkan budaya reflektif walau refleksi belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Hasil refleksi mulai digunakan sebagai umpan balik, namun belum efektif untuk perbaikan kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan mulai menumbuhkan budaya reflektif secara sistematis dan menyeluruh. Hasil refleksi mulai digunakan sebagai umpan balik, dan dimanfaatkan secara konstruktif untuk perbaikan kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan telah membangun suasana kerja yang menumbuhkan budaya reflektif secara sistematis dan menyeluruh, melibatkan pemangku kepentingan untuk memberi masukan. Perbaikan kualitas pembelajaran dan berbagai elemen pendukungnya selalu dilakukan berdasarkan hasil refleksi sebagai umpan balik yang konstruktif.

Pengelolaan Sumber Daya

Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kepala Satuan Pendidikan belum secara aktif mengembangkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK); pengembangan masih	Kepala Satuan Pendidikan mulai mengembangkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui beberapa strategi, namun belum terprogram, belum	Kepala Satuan Pendidikan memimpin pengembangan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) secara terprogram dan berkelanjutan dengan menggunakan strategi	Kepala Satuan Pendidikan memimpin pengembangan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) secara strategis, terprogram, dan berkelanjutan; meng-
--	--	--	---	--

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
	bersifat insidental, belum terarah, dan belum berbasis kebutuhan.	berkelanjutan, dan belum berbasis kebutuhan yang diidentifikasi secara sistematis.	yang beragam, berbasis kebutuhan dan data, namun dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran belum optimal.	optimalkan pemanfaatan sumber daya serta menggunakan data dan kebutuhan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga berdampak nyata pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Mengoptimalisa- si Sumber Daya untuk Kegiatan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan mengelola sumber daya secara administratif, dan pelaksanaannya belum konsisten dan belum optimal dalam mendukung kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan mulai mengelola sumber daya secara terprogram dan berbasis data, namun pelaksanaannya belum konsisten dan belum optimal dalam mendukung kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan mengelola sumber daya secara strategis dan berbasis data, serta mengelola seluruh sumber daya mulai konsisten dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin pengelolaan sumber daya secara strategis dan berbasis data; mengelola seluruh sumber daya secara optimal untuk mendukung pembelajaran berkualitas dan meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan.
Manajemen Sekolah	Kepala Satuan Pendidikan mulai melaksanakan fungsi pengelolaan satuan	Kepala Satuan Pendidikan mulai menyusun perencanaan kegiatan pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan memimpin perencanaan kegiatan pendidikan berbasis data dan	Kepala Satuan Pendidikan mengelola siklus manajemen pendidikan secara utuh dan



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
	pendidikan, namun perencanaan kegiatan pendidikan belum berbasis data dan kebutuhan sekolah, pelaksanaan program belum terkoordinasi secara sistematis, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan belum dilakukan secara terstruktur.	secara lebih sistematis dengan memanfaatkan sebagian data sekolah. Pelaksanaan program pendidikan telah berjalan sesuai rencana, namun koordinasi pelaksanaan dan mekanisme pengawasan kegiatan pendidikan masih perlu diperkuat agar konsisten dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.	kebutuhan sekolah, mengoordinasikan pelaksanaan program secara terstruktur, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan secara berkala untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran.	berkelanjutan, perencanaan kegiatan pendidikan berbasis data dan analisis kebutuhan, pelaksanaan program secara efektif dan kolaboratif, serta pengawasan dan evaluasi berbasis bukti yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan sehingga berdampak nyata pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Kemitraan dan Ekosistem Pembelajaran

Mengembangkan Kemitraan dengan orang tua, masyarakat, komunitas sekolah, DUDI	Kepala Satuan Pendidikan belum memimpin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dan belum	Kepala Satuan Pendidikan mulai memimpin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mulai mengelola kemitraan, namun pelaksanaannya	Kepala Satuan Pendidikan memimpin kolaborasi secara terencana dengan berbagai pemangku kepentingan serta mengelola kemitraan	Kepala Satuan Pendidikan memimpin kolaborasi secara strategis dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan serta
--	--	---	--	--

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
	mengelola kemitraan secara terarah untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.	belum konsisten dan belum terkelola secara sistematis untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.	secara sistematis, namun kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran belum optimal.	mengelola kemitraan secara efektif sehingga berdampak nyata pada terciptanya ekosistem pembelajaran yang berkualitas.
Mewujudkan Lingkungan Belajar yang saling Memuliakan, Aman, dan Nyaman	Kepala Satuan Pendidikan menyadari bahwa penting untuk menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, nyaman dengan interaksi yang saling memuliakan, namun belum ada program untuk hal tersebut.	Kepala Satuan Pendidikan mulai menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, nyaman dengan interaksi yang saling memuliakan, namun belum menjadi karakter dan budaya sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, nyaman dengan interaksi yang saling memuliakan secara terprogram dan mulai menjadi karakter dan budaya sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan mewujudkan karakter dan budaya sekolah dengan menginternalisasi lingkungan belajar dan bekerja yang aman, nyaman dengan interaksi yang saling memuliakan secara terprogram dan sistematis, melibatkan seluruh warga satuan pendidikan

Pemanfaatan Teknologi Digital

Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Digital	Kepala Satuan Pendidikan belum memiliki rencana dan program untuk	Kepala Satuan Pendidikan telah menyusun rencana dan program untuk pengembangan	Kepala Satuan Pendidikan telah memimpin transformasi pembelajaran dan tata	Kepala Satuan Pendidikan telah memimpin transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah
--	---	--	--	---



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
untuk Pembelajaran dan Administrasi	pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi digital dan belum melakukan transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah berbasis teknologi digital	dan pengelolaan infrastruktur teknologi digital namun belum sepenuhnya dilaksanakan untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah	kelola sekolah berbasis teknologi digital secara terprogram, namun pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi digital masih parsial dilakukan pada sebagian proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan.	berbasis teknologi digital secara terprogram. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi digital telah dilakukan secara efisien dan terintegrasi pada berbagai proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan.
Meningkatkan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Memanfaatkan TIK	Kepala Satuan Pendidikan belum terencana meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK; mulai memanfaatkan TIK untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan belum terencana meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK; belum secara optimal memanfaatkan TIK untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK secara terprogram dan berkelanjutan; dan memanfaatkan TIK namun belum optimal untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK secara terprogram dan berkelanjutan; dan memanfaatkan TIK secara optimal untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola sekolah.



B. Kriteria Keberhasilan Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial

Kriteria keberhasilan Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial dibagi ke dalam aspek input, proses, output, dan outcome.

Mengingat Sekolah Model Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial juga menerapkan Pembelajaran Mendalam maka indikator pada 4 aspek tersebut terintegrasi pada 3 aspek indikator keberhasilan pembelajaran mendalam sebagai berikut

1. Keunggulan Belajar Murid

Aspek Keunggulan Belajar Murid memiliki beberapa dimensi, yaitu Budaya Belajar dan Capaian Belajar. Indikator Koding dan Kecerdasan Artifisial pada 2 dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Kriteria Keberhasilan Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Aspek Keunggulan Belajar Murid

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Budaya Belajar				
Projek Koding dan Kecerdasan Artifisial yang dikembangkan murid	Murid belum mampu mengembangkan projek sederhana terkait materi mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.	Murid mulai mampu mengembangkan projek sederhana berbasis masalah yang kontekstual pada sebagian kecil materi mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dengan arahan guru.	Murid mulai mampu mengembangkan projek sederhana berbasis masalah yang kontekstual pada sebagian besar materi mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dengan arahan guru.	Murid mulai mampu mengembangkan projek sederhana berbasis masalah yang kontekstual pada sebagian besar materi mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial sesuai aspirasinya. (tidak bergantung pada arahan guru)



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Capaian Belajar				
▪ Peningkatan kompetensi Koding dan Kecerdasan Artifisial ▪ Peningkatan literasi digital ▪ Peningkatan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis.	Murid belum memahami konsep Koding dan Kecerdasan Artifisial, belum menerapkan teknologi digital dengan bijak dan aman, serta belum menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis.	Murid mulai memahami konsep dasar Koding dan Kecerdasan Artifisial, mulai menerapkan teknologi digital dengan bijak dan aman, serta mulai menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis.	Murid mulai menerapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam menyelesaikan permasalahan sederhana secara kritis, logis, dan sistematis.	Murid mulai menerapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam menyelesaikan permasalahan kompleks secara kritis, logis, dan sistematis.

2. Keunggulan Mengajar Pendidik

Aspek Keunggulan Mengajar Pendidik pada Pembelajaran Mendalam memiliki beberapa dimensi, yaitu Mengajar secara Efektif, Asesmen Otentik dan Berkeadilan, dan Pengembangan Diri. Namun pada Sekolah Model Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial hanya dimensi mengajar secara efektif saja yang memiliki indikator terkait Koding dan Kecerdasan Artifisial. Indikator pada dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.



Tabel 7 Kriteria Keberhasilan Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Aspek Keunggulan Mengajar Pendidik

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Mengajar secara Efektif				
Literasi digital guru	Pendidik baru memanfaatkan perangkat digital untuk mengetik atau menampilkan presentasi.	Pendidik telah memanfaatkan perangkat digital untuk mengeksplorasi sumber belajar.	Pendidik telah memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan interaktivitas dan partisipasi pembelajaran.	Pendidik telah berperan sebagai penggerak literasi digital di sekolah, membimbing rekan sejawat, serta aktif mengembangkan praktik baik dan inovasi digital secara berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi secara kontekstual dalam pelaksanaan/ pengelolaan pembelajaran	Pendidik menggunakan perangkat digital sebagai alat bantu pembelajaran, tanpa keterkaitan dengan konteks pembelajaran atau kebutuhan murid.	Pendidik menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar, seperti menayangkan materi atau memberikan tugas secara digital. Namun, pemanfaatannya masih terbatas dan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan murid.	Pendidik menerapkan teknologi secara beretika, kontekstual, dan terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan teknologi membantu murid memahami konsep, berkolaborasi, dan berpikir kritis sesuai situasi belajar mereka.	Pendidik telah berperan sebagai penggerak pemanfaatan teknologi secara beretika, kontekstual, dan terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan teknologi membantu murid memahami konsep, berkolaborasi, dan berpikir kritis sesuai situasi belajar mereka.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Asesmen Otentik dan Berkeadilan				
Pemanfaatan teknologi secara kontekstual dalam penilaian pembelajaran	Pendidik belum memanfaatkan teknologi untuk melakukan asesmen dan evaluasi proses pembelajaran.	Pendidik mulai memanfaatkan teknologi untuk melakukan asesmen dan evaluasi proses pembelajaran. Namun, hasilnya belum dianalisis dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran.	Pendidik memanfaatkan teknologi untuk melakukan asesmen, evaluasi proses pembelajaran, dan menganalisis hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan proses pembelajaran.	Pendidik telah berperan sebagai penggerak pemanfaatan teknologi untuk melakukan asesmen, evaluasi proses pembelajaran, dan menganalisis hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan proses pembelajaran.

3. Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan

Aspek Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan memiliki beberapa dimensi, yaitu Kepemimpinan Pembelajaran Mendalam, Pengelolaan Sumber Daya, Kemitraan dan Ekosistem Pembelajaran, dan Pemanfaatan Teknologi Digital. Indikator pada dimensi tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.



Tabel 8 Kriteria Keberhasilan Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Aspek Keunggulan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Kepemimpinan Pembelajaran Mendalam				
Memimpin implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial	Kepala Satuan Pendidikan mendorong implementasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial berdasarkan arahan pimpinan daerah.	Kepala Satuan Pendidikan memimpin implementasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial berdasarkan inisiatif dan analisis mendalam.	Kepala Satuan Pendidikan mengintegrasikan implementasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial pada visi, misi, atau tujuan budaya satuan pendidikan.	Kepala Satuan Pendidikan menjadi penggerak implementasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial pada tingkat daerah atau nasional.
Supervisi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial	Supervisi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial belum dilaksanakan secara berkala.	Supervisi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial mulai dilakukan secara berkala, namun masih terbatas pada aspek administratif.	Supervisi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial mulai dilaksanakan secara berkala dan berorientasi pada peningkatan kompetensi murid dan pendidik.	Supervisi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial telah menjadi bagian dari budaya satuan pendidikan dan berorientasi pada peningkatan kompetensi murid dan pendidik serta inovasi pembelajaran melalui proses yang kolaboratif dan berbasis data.



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Pengelolaan Sumber Daya				
Penguatan kapasitas dan aktivasi komunitas belajar pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial	Belum ada upaya satuan pendidikan sistematis untuk meningkatkan kapasitas pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial, baik dalam bentuk pendampingan atau aktivasi komunitas belajar pendidik.	Satuan pendidikan mulai memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dasar, atau komunitas belajar pendidik. Namun, kegiatan tersebut masih insidental, belum berkelanjutan, dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan.	Satuan pendidikan melaksanakan program penguatan kapasitas pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial yang terencana, relevan, dan berkelanjutan misalnya melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dasar, atau komunitas belajar, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran.	Satuan pendidikan melaksanakan program penguatan kapasitas pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial yang terencana, relevan, dan berkelanjutan misalnya melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dasar, atau komunitas belajar dengan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran serta menghasilkan guru Koding dan Kecerdasan Artifisial yang mampu menjadi mentor bagi sekolah lain.
Penyediaan sumber belajar	Satuan pendidikan belum menyediakan sumber belajar terkait Koding dan Kecerdasan Artifisial	Satuan pendidikan telah menyediakan sumber belajar Koding dan Kecerdasan Artifisial,	Satuan pendidikan telah menyediakan berbagai sumber belajar Koding dan Kecerdasan Artifisial	Satuan pendidikan telah menyediakan berbagai sumber belajar Koding dan Kecerdasan Artifisial yang relevan, baik

Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Koding dan Kecerdasan Artifisial	sehingga pendidik dan murid harus berupaya untuk melakukan penyediaan secara mandiri.	yang relevan, baik cetak maupun digital. Namun, ketersediaannya masih terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem pembelajaran sekolah.	yang relevan, baik cetak maupun digital yang mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem pembelajaran satuan pendidikan. Namun, pemanfaatannya belum maksimal dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.	cetak maupun digital yang mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem pembelajaran satuan pendidikan. Pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial telah memanfaatkan sistem tersebut dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

Kemitraan dan Ekosistem Pembelajaran

Pengembangan kemitraan untuk mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial	Satuan pendidikan belum memiliki kemitraan eksternal yang mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.	Satuan pendidikan sudah memiliki kemitraan eksternal yang mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Namun, kemitraan tersebut belum berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.	Satuan pendidikan sudah memiliki kemitraan eksternal yang mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dan telah berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.	Satuan pendidikan menjadi inisiator atau simpul kemitraan eksternal bagi satuan pendidikan lain serta menerapkan kemitraan yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.
---	--	--	---	---



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
Pemanfaatan Teknologi Digital				
Penyediaan sarana dan prasarana digital yang mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial	Satuan pendidikan belum memiliki sarana dan prasarana digital seperti koneksi internet, perangkat komputasi, dan perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.	Satuan pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana digital seperti koneksi internet, perangkat komputasi, dan perangkat lunak namun kapasitasnya kurang memadai untuk mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.	Satuan pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana digital seperti koneksi internet, perangkat komputasi, dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Namun, pemanfaatannya belum maksimal dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial.	Satuan pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana digital seperti koneksi internet, perangkat komputasi, dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Pemanfaatannya telah berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi pendidik pengampu Koding dan Kecerdasan Artifisial.
Mendorong pemanfaatan teknologi	Kepala satuan pendidikan belum mendorong pemanfaatan	Kepala satuan pendidikan telah memberikan arahan terkait pemanfaatan	Kepala satuan pendidikan telah memberikan arahan dan memantau secara	Kepala satuan pendidikan telah memberikan arahan, pemantauan secara berkala,



Indikator	Level 1 Pra Berkembang	Level 2 Berkembang	Level 3 Maju	Level 4 Unggul
digital secara kontekstual untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial yang bermakna	teknologi digital pada pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Pemanfaatan teknologi masih bergantung pada inisiatif pendidik.	teknologi digital pada pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Namun, belum ada pemantauan secara berkala terkait pemanfaatan teknologi tersebut.	berkala pemanfaatan teknologi digital pada pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Namun, belum ada evaluasi pemanfaatan dan dampak teknologi digital.	evaluasi, dan tindak lanjut pemanfaatan teknologi digital pada pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.



C. Contoh surat dukungan dan rekomendasi dan pernyataan komitmen

Berikut ini adalah **contoh** surat dukungan dan rekomendasi dan pernyataan komitmen. Bentuk surat **dapat disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga**.

KOP DINAS PENDIDIKAN/YAYASAN/MITRA

SURAT REKOMENDASI DAN DUKUNGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak atas nama [dinas pendidikan/yayasan/mitra] dengan ini memberikan dukungan dan rekomendasi kepada:

No	Jenjang	NPSN	Nama Sekolah
1.	Sekolah [.....]	[.....]	[.....]
2.	Sekolah [.....]	[.....]	[.....]
...	...	...	...

Sebagai sekolah model implementasi pembelajaran mendalam [dan koding dan kecerdasan artifisial].

Demikian surat dukungan dan rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

.....

.....

NIP/NIK.....

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

Saya dengan sungguh-sungguh siap menjadi Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam (PM) [dan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)] dan berkomitmen untuk memimpin satuan pendidikan saya dalam rangka mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan PM dan KKA ke dalam kurikulum satuan pendidikan (KSP).
2. Mengimplementasikan PM dan KKA dalam praktik pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan.
3. Menyediakan lingkungan pembelajaran kontekstual, aman, inklusif, dan berbasis pengalaman.
4. Mengelola komunitas belajar internal pendidik untuk refleksi dan penguatan praktik.
5. Membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar PM dan KKA di satuan pendidikan.
6. Menyusun dan melaksanakan proyek pengembangan/praktik baik sesuai fokus program.
7. Mendokumentasikan praktik baik dan melaporkan capaian implementasi secara berkala.
8. Menjadi contoh nyata pelaksanaan pembelajaran mendalam [dan mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial] yang utuh, konsisten, dan berkualitas sebagai acuan implementasi di satuan pendidikan lain.
9. Menyediakan ruang dan mekanisme bagi pendidik, pemangku kepentingan, dan satuan pendidikan lain untuk mengamati, mempelajari, serta mengadopsi praktik baik dalam penerapan pembelajaran mendalam [dan mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial].



10. Memfasilitasi kolaborasi antarsatuan pendidikan, komunitas pendidik (seperti KKG/ MGMP), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat dukungan sistematis terhadap penerapan pembelajaran mendalam [dan mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial] secara berkelanjutan.
11. Membentuk tim kerja di tingkat satuan pendidikan untuk mengawal implementasi.
12. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi terkait PM dan Berfikir Komputasional dan Kecerdasan Artifisial (BKKA)/KKA dalam kelompok kerja pendidik dan kepala sekolah di tingkat gugus/kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Kepala

.....

NIP/NIK.....





Kemendikdasmen
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan